



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PEMBERDAYAAN
PERMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

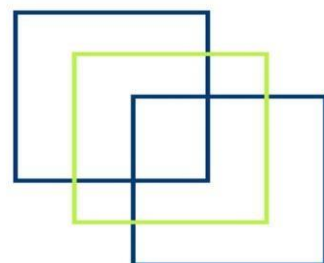
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025



**Jl. Jend. Sudirman, Tungkal IV Desa, Kec. Tungkal
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
36514**



<https://p3ap2kb.tanjabbarkab.go.id/>



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Dinas P3AP2KB dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja ini secara umum menggambarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang ditetapkan selama periode satu tahun anggaran. Pada tahun 2025 capaian sasaran dan IKU telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, kami menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu kinerja organisasi. Saya mengapresiasi seluruh kerja keras dan upaya yang sudah dilakukan jajaran keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan seluruh stakeholder terkait serta mitra kerja yang telah bekerja sama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat atas kinerja yang dihasilkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan Rencana kerja pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB di tahun mendatang. Kepada Tim Fungsional perencana sebagai penyusun laporan ini kami ucapkan terima kasih atas semangat dan dedikasinya sehingga laporan ini tersusun dengan baik.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan KB

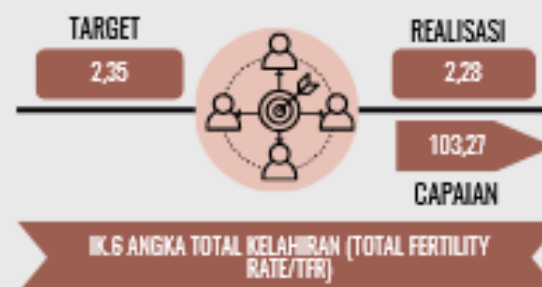
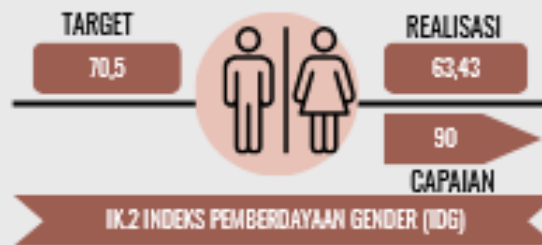
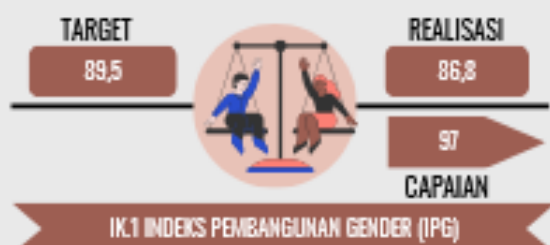
AINA DEWIANA

SUMMARY REPORT

CAPAIAN KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

SS.1.3 MENINGKATNYA KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN KELUARGA

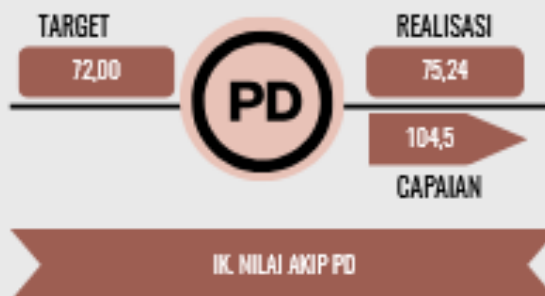


CAPAIAN KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

SS.1.3 MENINGKATNYA KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN KELUARGA



SS2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



An illustration of a family of five running happily across a green field. The mother, in an orange dress, and father, in an orange shirt and brown pants, are in the center. They are followed by three children: a boy in a yellow shirt and brown shorts, a boy in a red shirt and brown pants, and a girl in a green shirt and patterned shorts. The background features a blue sky with white clouds, a pink and green striped kite in the top left, a large yellow sun in the top right, and a white dove flying on the left. A blue street lamp is on the far left. The overall mood is joyful and positive.

STOP!!

KEKERASAN RUMAH TANGGA
SAYANGI KELUARGAMU

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan di Tanjung Jabung Barat antara lain pemberdayaan perempuan dalam segala bidang pembangunan, implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan kualitas dan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB disusun selaras dengan RPJMD 2025-2029, dengan fokus pada empat tema, yakni: 1) Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan, yang menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan; dan 2) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 3) Pengendalian Penduduk merupakan faktor penting untuk menciptakan pertumbuhan populasi yang seimbang, 4) Pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan keluarga sejahtera merupakan salah satu strategi untuk menekan pertumbuhan penduduk dan membangun keluarga berkualitas serta menurunkan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah menetapkan Tujuan 1) Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi; dan 2) Terwujudnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang berkinerja tinggi dan akuntabilitas. Dan Menetapkan 7 sasaran strategis yaitu; 1). Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 2) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan; 3) Meningkatnya Kualitas Keluarga; 4) Meningkatnya perlindungan terhadap anak; 5) Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk; 6) Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi (KBKR); 7) Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS), Selain menjalankan tugas dan fungsi utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB juga melaksanakan 5 arahan Presiden terkait perlindungan perempuan dan Anak, yaitu 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak ; 5) Pencegahan perkawinan anak.

Dalam mencapai kinerja diperlukan Strategi komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Renstra. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan menjadi prioritas utama melalui penguatan kebijakan responsif gender, perubahan pola pikir masyarakat, dan program pemberdayaan. Di sisi lain, akses pelayanan anak akan ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada anak, penguatan sistem pemenuhan hak anak, edukasi, dan pencegahan perkawinan anak. Sinergi dengan lembaga masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga juga menjadi strategi utama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan pendekatan pentahelix melalui sinergi, kolaborasi, dan penguatan lembaga lembaga

masyarakat peduli perempuan dan anak untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan akan Pditingkatkan melalui sistem layanan komprehensif, standardisasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Edukasi, pencegahan kekerasan, dan penguatan sistem data juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya ini. Terakhir, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi landasan kuat bagi seluruh upaya tersebut. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, akuntabilitas, serta pengembangan SDM akan memastikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB siap menjawab panggilan tugas Menuju “Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

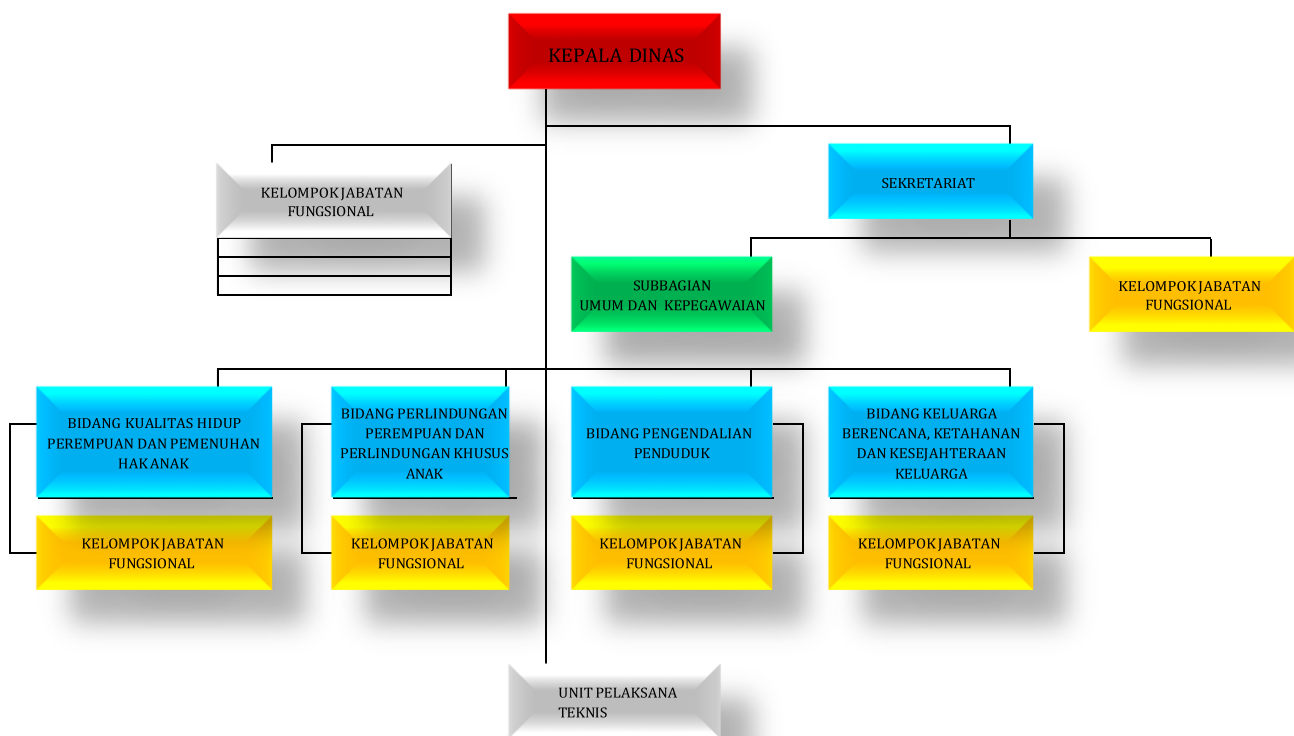
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 telah ditetapkan 5 tujuan pembangunan dengan 14 sasaran. Salah satu tujuan yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Penguatan Daya saing sumberdaya manusia dan kesetaraan gender”. Bupati memberikan tugas kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kualitas Hidup perempuan , Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan di bantu oleh 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang dan 1 UPT PPA. Adapun struktur organisasi DP3AP2KB dapat dilihat pada gambar 1.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari 26 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 staf PPPK, dan 34 pegawai P3K Paruh Waktu. Sebanyak 36 pegawai berjenis kelamin perempuan (70%) dan 27 laki-laki (30%). Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 44,44% adalah lulusan S1, 4,76% lulusan S2, 4,76% lulusan D3, dan lainnya lulusan D1, dan SMA/SMK.

Dari 63 pegawai ASN, sebanyak 61% merupakan golongan III, 24% golongan IV, dan 15% golongan II. Sementara itu, dari 31 staf PPPK sebanyak 3,17% merupakan golongan IX, 1,59% Golongan V, 53,97% golongan VII. Jabatan ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB terdiri dari 1 orang JPT 5 Pejabat Administrator, Jabatan Fungsional (JF) Keahlian, dan JF Administrasi. Pegawai yang menduduki JPT adalah 1 orang Kadis, dan jabatan administrator dijabat oleh 1 Sekretaris dan 4 orang Kabid. Sementara, dari 8 pegawai JF Keahlian, tersebar menjadi 6 orang JF keahlian muda, dan 2 orang JF Keahlian pertama. Sementara itu, dan 73,02% merupakan Jabatan Administrasi Pelaksana (Gambar 1.2).

Gambar 1.2 SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB per Desember 2025

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu 1) Meningkatnya Akses dan kualitas layanan kesehatan 2) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Keterkaitan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam Perbup nomor 5 Tahun 2025 tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB bertanggungjawab untuk berkontribusi secara langsung terhadap Sasaran Pembangunan pada RPJMD 2025-2029, yaitu untuk Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemenuhan hak anak. Adapun rincian dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB pada setiap Program Nasional, melalui pelaksanaan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang tertuang dalam RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Mandat Program Nasional, Program Prioritas RPJMD dan Peran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) Kementrian	Program Prioritas RPJMD	Kegiatan Prioritas (KP)
04. Memperkuat Pembangunan SDM, sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta penguatan Peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	➤ Program Perlindungan Khusus Anak	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ➤ Program Perlindungan Perempuan	➤ Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan, ➤ Perlindungan Perempuan
	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	➤ Program Keluarga Berencana	➤ Pelaksanaan Advokasi dan KIE KB dan Dalduk ➤ Pendayagunaan tenaga penyuluh KB ➤ Pengendalian dan Pendist
	Peningkatan Ketangguhan keluarga	➤ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	➤ Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ➤ Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

06.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	➤ Program Pengendalian Penduduk	➤ Pengembangan Ekonomi Perawatan
	Peningkatan kemandirian Pedesaan yang berkelanjutan	➤ Program Pengendalian Penduduk	➤ Tata kelola pendampingan / penyuluhan

1.4. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1.4.1. Isu Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di sektor pendidikan, Ekonomi, Politik, dan Sosial

Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia, bukan hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi. Kesenjangan gender dalam



kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Berdasarkan data BPS Tahun 2024 untuk Propinsi Jambi, IPM perempuan sebesar 69,56 dan laki-laki sebesar 77,72. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 8,16 poin antara IPM laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 adalah sebesar 86,53, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, yang berarti pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Secara Nasional data IPG Indonesia adalah 91,85 %, untuk IPG Propinsi Jambi 89,50

Pencapaian IPG antar kabupaten/kota di Propinsi Jambi juga terlihat masih terdapat ketimpangan. Berdasarkan data BPS, IPG tahun 2025 dilihat dari disparitas antar Kabupaten di Propinsi Jambi, terdapat ketimpangan capaian IPG sebesar 12,23 poin antara Kabupaten IPG tertinggi Kota Sungai Penuh (IPG 94,70) dan Kabupaten IPG terendah adalah Muaro Jambi (IPG. 82,47)

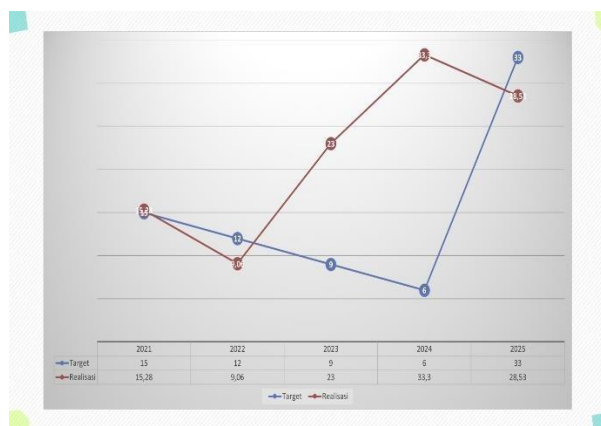
Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 77,62. Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di DPRD, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada Tahun 2025 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jambi adalah 64,85, Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 63,43.

1.4.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hasil pelayanan yang dilakukan di UPT PPPA Kab.Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 dalam setahun terakhir 60 kasus kekerasan dengan jumlah korban 47 orang, sebanyak 8% perempuan Anak sampai dewasa usia 6-51 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di perdesaan. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 8 dari 100.000 penduduk perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini.

Data Kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan berusia 6 sampai 51 tahun oleh pasangan dan selain pasangan dalam kurun waktu setahun terakhir dari 33,3 (2024) menjadi 28,53 (2025). Dengan kata lain menurun sebesar 4,47% dalam kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan terdata pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dalam lima tahun terakhir (2021-2025) rasio kekerasan pada perempuan fluktuatif / naik turun dari 15,28% pada 2021 meningkat menjadi 28,53 (2025). Rasio kekerasan pada tahun 2025 (28.3%) lebih rendah dari tahun 2025 (33,3%) . Begitupula dengan jumlah korban kekerasan menurun dari 65 orang (tahun 2024) menjadi 63 orang (Tahun 2025).



Berdasarkan pengaduan yang diterima melalui Simfoni PPA maupun pelayanan langsung pada Unit Pelaksana Tekhnis Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2025 kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi pada usia 13-17 tahun (18 korban) dan 6-12 tahun (16 korban) dengan Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan, pada tahun 2025 ada 22 laporan KDRT. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 3 tahun terakhir. Sementara itu, jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, pendampingan psikolog dan bantuan hukum.

Selain itu, data pada Simfoni PPA wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2025, korban KtA yang paling banyak adalah anak perempuan sebanyak 32 orang. Jenis kekerasan yang banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2023-2025. Sementara itu, pelaku yang sering melakukan kekerasan adalah pacar/teman, orang tua, lainnya, dan tetangga. Berdasarkan tempat kejadiannya, KtA paling banyak terjadi di rumah tangga. Selain itu, tempat lainnya, fasilitas umum, dan sekolah juga sering menjadi tempat KtA. Terdapat empat jenis layanan yang paling banyak diterima anak korban kekerasan yaitu pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan penegakkan hukum. Selain itu, layanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, dan pemulangan juga diterima korban KtA. Layanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban

1.4.3. Isu Perkawinan Anak

Tren persentase perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun dari tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2025 Meskipun persentasenya turun, laju penurunannya secara rata-rata hanya berkisar 5% sehingga tetap perlu upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengendalikan terjadinya permohonan

dispensasi perkawinan. Hingga saat ini pemerintah masih mendeteksi adanya perkawinan anak yang diajukan dan dikabulkan dikarenakan anak mengalami kehamilan. Padahal, kehamilan usia anak dapat meningkatkan risiko anak lahir stunting, masalah kesehatan lainnya, hingga kematian.



Gambar 1.4 Tren yang Menikah Sebelum Berumur 18 tahun 2021-2025 Sumber: Kemenag Tanjab Barat 2021-2025

Pernikahan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal sedangkan anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masuk kedalam dunia kerja formal. Anak yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang rendah atau putus sekolah lebih rentan mengalami perkawinan dibawah 15 tahun atau 18 tahun dan begitupun sebaliknya.

1.4.4. Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49Th) Masih Relative Tinggi

Pada aspek kependudukan hal paling mendasar dalam pembangunan apabila di lihat dari nilai universal, dimana penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Peran penduduk tersebut, kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui berbagai sumberdaya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk meningkatkan kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat). Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu Yearly Performance dan Reproductive History, salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan Yearly Performance adalah Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total. TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Dengan keberhasilan dan konsistensi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia selama kurang lebih 4-5 dekade, TFR di Indonesia berhasil mengalami penurunan yang sangat nyata dari 5,6 anak per perempuan pada tahun 1971 menjadi 2,14 anak per perempuan tahun 2022.



Gambar 1.5 TFR Tahun 2021-2025

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat TFR ditargetkan pada tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 2.54 kelahiran per wanita usia subur dan menjadi 2.39 pada tahun 2024 (*Sumber data Data SIGA 2025*). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026

1.4.5. Kebutuhan Ber-KB yang Belum Terlayani

Menurut Bradley et al (2012), Unmet Need KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau menjarangkan

kehamilan. Makna harfiah atau makna literal dari kata unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini pun tidak sesuai dengan keinginannya (Listyaningsih, et al, 2016).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unmet need persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase wanita kawin/Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Berdasarkan karakteristik dan hasil penelitian serta latar belakang bahwa 25,7 persen unmet need terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berumur 45-49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar unmet need terjadi pada perempuan yang tingkat kesuburannya sudah berkurang. Sebanyak 22,7 persen diantaranya bahkan Tidak Ingin Anak lagi (TIAL). Unmet need yang tinggi juga terdapat pada PUS dengan jumlah anak 4 (empat) atau lebih (26,5 persen). Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ini dapat diarahkan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) agar tidak menyebabkan drop out (DO) yang berkontribusi pada angka unmet need.

Berdasarkan tingkat pendidikan, unmet need paling banyak terjadi pada tingkat pendidikan terendah (tidak tamat SD) sebanyak 26,1 persen. Kelompok tertinggi selanjutnya justru terjadi pada tingkat pendidikan tertinggi (Perguruan Tinggi) sebanyak 18,9 persen. Dengan adanya fenomena ini maka perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Beberapa Beberapa studi telah menemukan hubungan antara pendidikan dan pemakaian kontrasepsi. Secara nasional, angka unmet need pada tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 sebesar 14,7 persen. Capaian ini mengindikasikan hal yang positif karena angka unmet need mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18 persen. Target unmet need pada tahun 2025 adalah 11,65 dan realiasi 11,10.

2. Arah Kebijakan DP3AP2KB

Mempertimbangkan isu strategis diatas, maka arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk mendukung mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani salah satunya adalah “ Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif. Dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB yaitu : **Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi**, melalui :

1. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan kualitas hidup perempuan perempuan dan pemenuhan Hak Anak akan difokuskan pada.
 - a. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara kolaborasi antar lembaga dan mitra stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan

penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi termasuk perempuan penyintas korban kekerasan;

- c. Peningkatan literasi politik perempuan;
 - d. Penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - e. Peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus
2. Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak difokuskan pada:
- a. Penguatan layanan penanganan kekerasan bagi Perempuan dan anak secara terpadu, termasuk di ranah daring dan pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - b. Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak;
 - c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif;
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan UPT PPA dengan Mitra Stake Holder pelayanan;
 - e. Penciptaan lingkungan ramah anak.
3. Pengendalian Penduduk dan KB difokuskan pada:
- a. Peningkatan Penggunaan Alat Kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif menurunkan angka unmet need;
 - b. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sekolah lansia, untuk peningkatan kualitas keluarga;
 - c. Peningkatan kualitas kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,PIK-R,UPPKA) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga;
 - d. Peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus;

STUNTING BISA DICEGAH SEJAK DINI

CEGAH STUNTING, WUJUDKAN ANAK SEHAT

2.

RENCANA KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas,Ekonomi Maju, Religius, Aman, Harmonis,Mandiri dan Inovatif) ”

2.1.2. Misi

Untuk Mencapai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 3 (Tiga) Misi, yaitu

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tentram,tertib,mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk secara implisit Menyusun Rencana Strategis dalam menjalankan tiap misi sesuai Program dan Kegiatan Yang tertuang dala Rencana Strategus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

2.1.3. Tujuan

Perumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, amanat peraturan perundang-undangan terkait, agenda pembangunan nasional, dan arahan Bupati untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB. Secara umum tujuan OPD untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yaitu:

“ Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan Perempuan Dan Anak,Mengedalikan Penduduk Dan Peningkatan Pelayanan Kb Serta Kesehatan Reproduksi Menuju Keluarga Berkualitas “

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, ditetapkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

Meningkatnya Kesenjangan Gender , Perlindungan Terhadap Perempuan, Meningkatkan Kualitas Keluarga, Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak, Terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas pelayanan KBKR dan Meningkatkan Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 1.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- 1.4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
- 1.5. Angka Perceraian
- 1.6. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 1.7. Angka Total Kelahiran / (total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 Tahun (TFR)
- 1.8. Angka total kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
- 1.9. Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
- 1.10. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)
- 1.11. Angka Pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, mengedukasi penduduk dan peningkatan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi menuju keluarga berkualitas	1) Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indikator Kinerja SS.1 :								
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,51	86,90	87	87,25	87,50	87,75	
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39	73,5	74	74,25	74,5	75	
		c. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	
	2) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Indikator Kinerja SS.2 :								UPT - PPA
		d) Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	6	33	32	31	39	29	
	3) Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indikator Kinerja SS.3 :								
		e) Angka Perceraian	Angka	0,75	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	
	4) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Indikator Kinerja SS.4 :								
		f) Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62,97	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	
	5) Terkendalinya Pertambahan Penduduk	Indikator Kinerja SS.5 :								
		g) Angka Kelahiran Total/ TFR (Anak Per Wanita 15-49 Tahun)	Angka	2,39	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	
		h) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) Per 10000 perempuanm usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	23	49	48	47	46	45	
	6) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi (KB/KR)	Indikator Kinerja SS.6 ;								
		i) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Angka	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	63,20	
		j) Cakupan PUS yang ingin Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	8,2	11,65	11,35	11,05	10,75	10,45	
	7) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indikator Kinerja SS.7;								
		k) Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,56	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Sebagai Pembanding capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah target dan capaian indikator kinerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Target dan realisasai prevalensi stunting propinsi jambi. Pada tabel dibawah ini adalah merupakan target dan realisasi capaian kinerja program pada Kemen PPPA dan BKKBN RI.

INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		
	STRATEGIS	STRATEGIS		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	1) Meningkatnya a Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan layak anak	Indikator Kinerja				
Terwujudnya		SS.1 :				
kesetaraan		a. Indeks	Indeks	91,76	91.85	100,1%
gender dan		Pembangunan				
perlindungan		Gender (IPG)				
anak		b. Indeks	Indeks	79,16	76,9	97,15
melalui		Pemberdayaan				
Indonesia		Gender (IDG)				
Ramah		c. Tingkat	%	53,5	56,42	105,46
Perempuan		Partisipasi				
dan layak		Angkatan Kerja				
anak		(TPAK) Perempuan				
	Ramah Perempuan dan Layak Anak	d. Indeks	Indeks	63,9	63,9	99,89
		Perlindungan Anak (IPA)				
		e. Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan (KtP)	%	7,8	6,6	118,18

Tabel 3.2
Tren Angka Prevalensi Stunting Propinsi Jambi Tahun 2013-2025

NO	KABUPATEN/KOTA	RISKESDAS 2013	RISKESDAS 2018	SSGBI 2019	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	SELISIH 2023-2024
1	Kerinci	55,3	42,36	33,85	26,7	24,2	8,7	16,4	-7,7
2	Merangin	37,5	34,97	15,38	19,7	14,5	14,9	9,6	5,3
3	Sarolangun	40,8	18,83	19,06	21,4	16,8	4,8	6,6	-1,8
4	Batanghari	39,5	32,75	27,32	24,5	26,3	10,1	18,4	-8,3
5	Muaro Jambi	50	20,68	13,51	27,2	18,6	12	18,8	-6,8
6	Tanjung Jabung Timur	48,5	40,89	20,05	25,6	22,5	23,7	23,9	-0,2
7	Tanjung Jabung Barat	29,6	43,99	21,81	19,8	9,9	14,1	7	7,1
8	Tebo	41,4	33,02	30,13	26,2	25	22,7	24,2	-1,5
9	Bungo	34,5	20,74	27,57	22,9	15,4	13,7	20,4	-6,7
10	Kota Jambi	24,6	26,22	18,62	17,4	14	13,5	10,3	3,2
11	Kota Sungai Penuh	36,9	35,75	25,66	25	26	4,1	8	-3,9
Provinsi Jambi		37,9	30,12	21,03	22,4	18	13,5	17,1	-3,6
Rata-Rata Prevalensi Prov. Jambi 2025								14,9	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,90
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan			
4.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Indeks	33
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Keluarga			
5.	Angka Perceraian	Angka	2,1
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak			
6.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,47

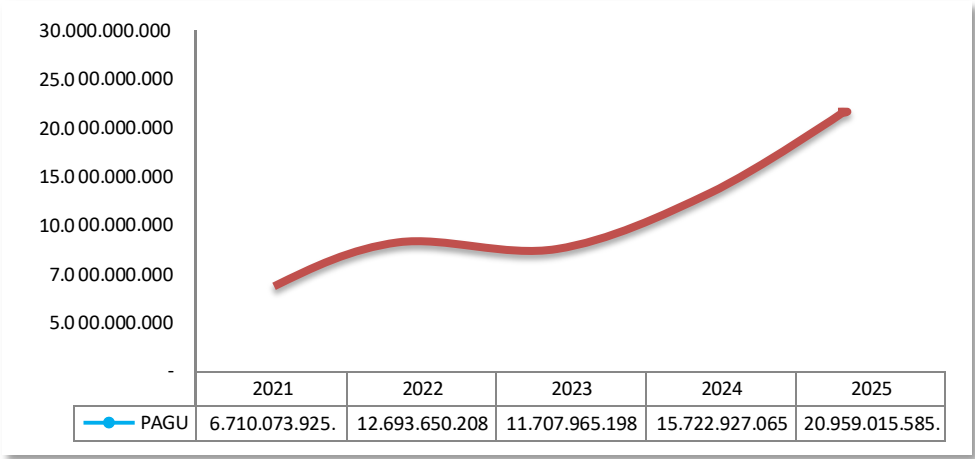
Sasaran Strategis 5: Terkendalinya Pertsmbahan Penduduk			
7.	Angka total kelahiran /(Total frertility rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun	Angka	2,35
8.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	49
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi(KBKR)			
9.	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun	Angka	69,70
10.	Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Anggka	11,65
Sasaran 7; Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)			
11.	Indeks Pembangunan Keluarag (I Bangga)	Nilai	66,68

Untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.959.015.585,- dengan sumber dana berasal dari APBD dan APBN (DAK BOKB dan DAK PPPA)

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025 Per Program

No.	Program	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6,712,495,985.00	5,922,511,591.00	88,23
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	836,571,200.00	775,287,276.00	92,67
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5,226,935,600.00	5,132,687,830.00	98.20
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	147,244,000.00	122,873,400.00	83.45
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	357,034,800.00	309,003,362.00	86.55
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	137,029,000.00	108,209,206.00	78.97
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	779,099,800.00	691,017,000.00	88.69
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,891,708,000.00	4,426,591,944.00	90.49
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,870,897,200.00	1,756,319,200.00	93.88
	Total	20,959,015,585.00	19,244,500,809.00	91.82

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memperoleh kenaikan pagu alokasi anggaran pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2021-2024. Secara rinci, perkembangan pagu alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2021-2025 terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Perkembangan Pagu Anggran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2021 - 2025

2.3. PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantauan kinerja dan anggaran secara internal dilakukan pada rapat pimpinan yang dilakukan setiap bulan melalui dialog kinerja organisasi, pengukuran kinerja melalui Laporan evaluasi kinerja individu .

3. AKUNTABILITAS KINERJA



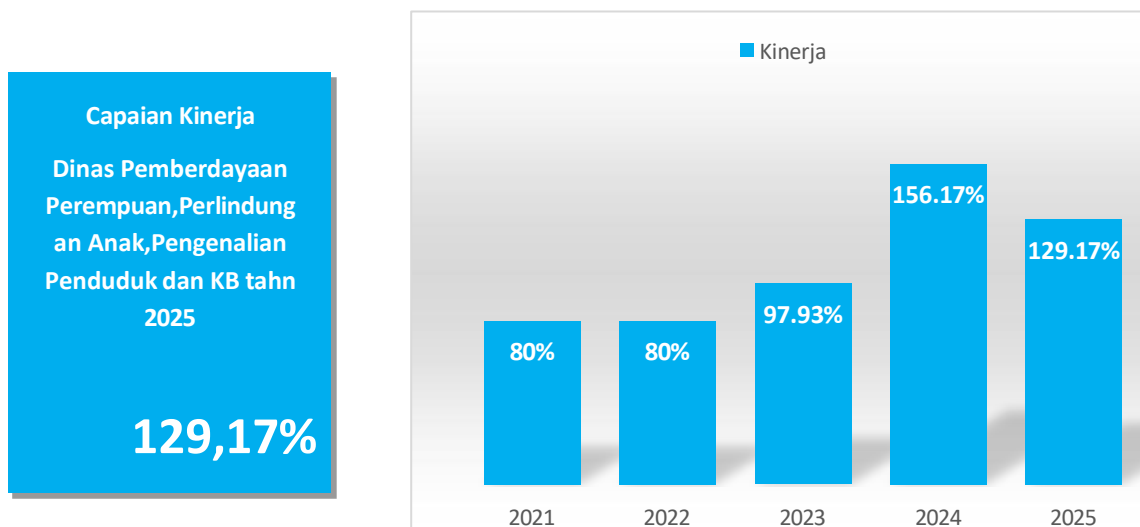
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2025 adalah 129,17% dengan predikat kinerja “Baik”, angka ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas P3AP2KB tahun 2025. Capaian kinerja sasaran strategis merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran strategis.



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan dari tahun 2024 ke Tahun 2025. Adanya penurunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 27 poin, hal disebabkan adanya penyesuaian dalam penetapan target Renstra.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memiliki 11 indikator sasaran strategis. Dari 11 indikator tersebut, sebanyak 6 indikator dengan predikat “Istimewa” dengan nilai >100

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,90	86,8	99,88 ●
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39	63,43	86,42 ●
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54	0,58	93,10 ●
4	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Indeks	33	28,53	115,67 ●
5	Angka Perceraian	Angka	2,1	1,49	141 ●
6	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,47	69,01	108,72 ●
7	Angka total kelahiran /(Total fretility rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun	Angka	2,35	2,31	101,70 ●
8	Age spesifik Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Angka	65	23,7	274,20 ●
9	Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Anggka	11,65	5,6	208,04 ●
10	Indeks Pembanguna Keluarga (I Bangga)	Indeks	66,68	66	98,9 ●
11	Angka pemakaian kontrasepsi (MCPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	69,79	65	93,25 ●
Rata-rata Capaian Kinerja					128,35 ●

Keterangan: Predikat Kinerja

- kinerja > 100% (istimewa)
- 80% < kinerja ≤ 100% (Baik)
- 60% < kinerja ≤ 80% (Butuh Perbaikan)
- 20% < kinerja ≤ 60% (Kurang)
- 0% ≤ kinerja ≤ 20% (Sangat Kurang)

3.1.1 KONDISI KESETARAAN GENDER DI TANJUNG JABUNG BARAT

Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami berbagai tantangan dan perkembangan, hal ini dapat dilihat dari beberapa point, diantaranya :

3.1.1.1 Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemberdayaan gender adalah upaya meningkatkan kemampuan, akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik) untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Fokus utamanya adalah memandirikan perempuan, menghapus diskriminasi, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran diri perempuan akan hak – haknya, meningkatkan kepercayaan diri, dan memastikan kesempatan yang setara dalam pembangunan. Strategi dan upaya yang dilakukan antara lain peningkatan keterampilan, pengarusutamaan gender dan pendidikan, dan semua itu telah dituangkan dalam Renstra P3AP2KB. Indikator keberhasilan Untuk dapat mengetahui capaian kesetaraan gender di suatu Daerah diukur berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). DP3AP2KB tidak melakukan survey untuk mengukur indikator tersebut secara langsung, tetapi mendapatkan data melalui BPS Tanjung Jabung Barat. Dari Hasil Pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks pembangunan gender Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diketahui melalui Tabel 3.2

Tabel 3.2 Peringkat IPG ,IDG dan IKG Propinsi Jambi,Tahun 2025

No	Kota/Kabupaten	Skor Kabupaten			Peringkat		
		IPG	IDG	IKG	IPg	IDG	IKG
1	Propinsi Jambi	90,45	64,85	0,51			
2	Kota sungai Penuh	95,7	53,62	0,69	2	11	11
3	Kota Jambi	96,32	66,98	0,17	1	2	1
4	Kab.sarolangun	92,44	65,83	0,55	4	3	8
5	Kab.Muaro Jambi	83,72	65,81	0,51	11	4	5
6	Kab.Bungo	89,95	59,34	0,48	5	8	4
7	Kab.Tanjab Timur	89,18	65,1	0,51	7	6	6
8	Kab.Tanjab Barat	87,06	63,43	0,55	9	7	7
9	Kab.Batanghari	87,05	74,48	0,43	10	1	2
10	Kab.Tebo	92,43	58,35	0,58	3	9	9
11	Kab.Kerinci	87,9	65,14	0,47	8	5	3
12	Kab.Merangin	89,94	58,12	0,64	6	10	10

Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat , Tahun 2025

3.1.2 Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Indonesia

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan masalah serius di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup tindak kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran, seringkali berakar pada ketidaksetaraan gender dan pola asuh. Pelaku seringkali adalah orang terdekat, seperti suami atau anggota keluarga, dengan puluhan kasus tercatat setiap tahunnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di Indonesia dan dunia. Dalam konteks global, Indonesia menghadapi tantangan yang mirip dengan banyak negara berkembang, tetapi dengan beberapa karakteristik unik terkait budaya, hukum, dan implementasi kebijakan.

1. Kekerasan terhadap perempuan

Berdasarkan Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa 8 orang perempuan yang mengalami kekerasan dari tiap 100.000 penduduk perempuan, dan menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2025 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan prevalensi global yang dilaporkan oleh WHO, yaitu 1 dari 3 perempuan.



2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator statistik yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak di suatu wilayah. Indeks ini digunakan pemerintah untuk mengevaluasi jaminan rasa aman anak dari berbagai ancaman dan kekerasan. Indeks ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu;

- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) gunanya untuk mengukur capaian hak-hak dasar anak, seperti hak sipil, Kebebasan, Pendidikan, kesehatan serta lingkungan Keluarga.
- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur tingkat jaminan rasa aman anak yang rentan, termasuk anak korban kekerasan, eksploitasi, penyandang disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Data indeks Perlindungan anak ini biasanya dipublikasikan secara berkala oleh Lembaga Pemerintahan, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat statistik (BPS). Peningkatan secara Nasional tahunan yang mengevaluasi kepatuhan dan Propinsi dan Kabupaten Kota dalam meningkatkan hak-hak anak. Pada tahun 2024 Indeks Hak Anak di Propinsi Jambi berada di peringkat 9 dari 38 Propinsi dengan Capaian IPA untuk propinsi Jambi 71,71 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang menggunakan metode lama Propinsi Jambi berada pada peringkat ketiga Nasional, namun skor keseluruhan mengalami penurunan sebesar 1,33 point. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan realisasi capaian IPA Tahun 2024 adalah 69,01, IPHA adalah 67,04 dan IPKA adalah 77,48. Tahun 2024 untuk Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada peringkat 7 dari 11 Kabupaten, Hal ini mengindikasikan masih perlu banyak peningkatan pada tiap klaster yang menjadi indikator penilaian Indeks Perlindungan Anak. terutama tantangan dalam bidang-bidang seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghormatan terhadap pandangan anak



Gambar 3.5 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2024

3.1.3 Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB/KS) adalah upaya pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan jarak kehamilan. Program ini merupakan pilar utama dalam membangun generasi yang lebih sehat dan terencana. Dalam upaya menuju Indonesia emas 2045. Program ini berfokus pada dua aspek utama yaitu Kualitas (Mengendalikan Kelahiran) dan Kualitas (Kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Program ini adalah bagian dari pengendalian penduduk dengan cara ;

- Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), untuk mencegah pernikahan dini guna memastikan kesiapan fisik , mental, dan reproduksi pasangan
- Pengaturan Jarak Kelahiran menggunakan metode kontraspesi seperti Pil, sunti, IUD,implan, kondom untuk menjarangkan kehamilan
- Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, adalah kegiatan untuk membimbing keluarga dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, dan keharmonisan rumah tangga.

Kebijakan dalam Program Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menjadi penting karena Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian di lain pihak. Program ini juga sebagai salah satu upaya pencegahan stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga melalui Kegiatan UPPKA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil capaian IKU pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk *Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi*, yang berkinerja tinggi dan akuntabel sudah sangat baik. Dari 11 IKU, sebanyak 6 IKU telah mencapai target yang ditetapkan ($\geq 100\%$) dan 5 IKU mencapai $> 95\%$ target. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk tahun berikutnya diuraikan pada laporan ini.

3.2.1 Sasaran Strategis

“Meningkatnya Kesenjangan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesenjangan Gender Di Kabupatepaten Tanjung Jabung Barat pada DP3AP2KB memiliki 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian 3 (tiga) IKU dari Sasaran Strategis 1 dijabarkan pada Tabel 3.3. Dari 3 indikator tersebut capaian raionya antara 80% dan 99,88%.

Tabel 3.3 Capaian 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesenjangan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,90	86,8	99,88 ●
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39	63,43	86,42 ●
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,54	0,58	93,10 ●
Rata-rata Capaian SS1					93,13 ●

3.2.1.1 Indikator Kinerja 1 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, pertahanan, infrastruktur, kelembagaan, dan budaya. (Alexander, 1994). Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat dilihat hanya dari pembangunan ekonominya saja namun juga dari pembangunan manusia. Disamping itu keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga perlu terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Isu gender telah menjadi salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Persoalan gender secara eksplisit tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yaitu:

“Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Untuk mencapai SDGs tersebut, maka salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional.

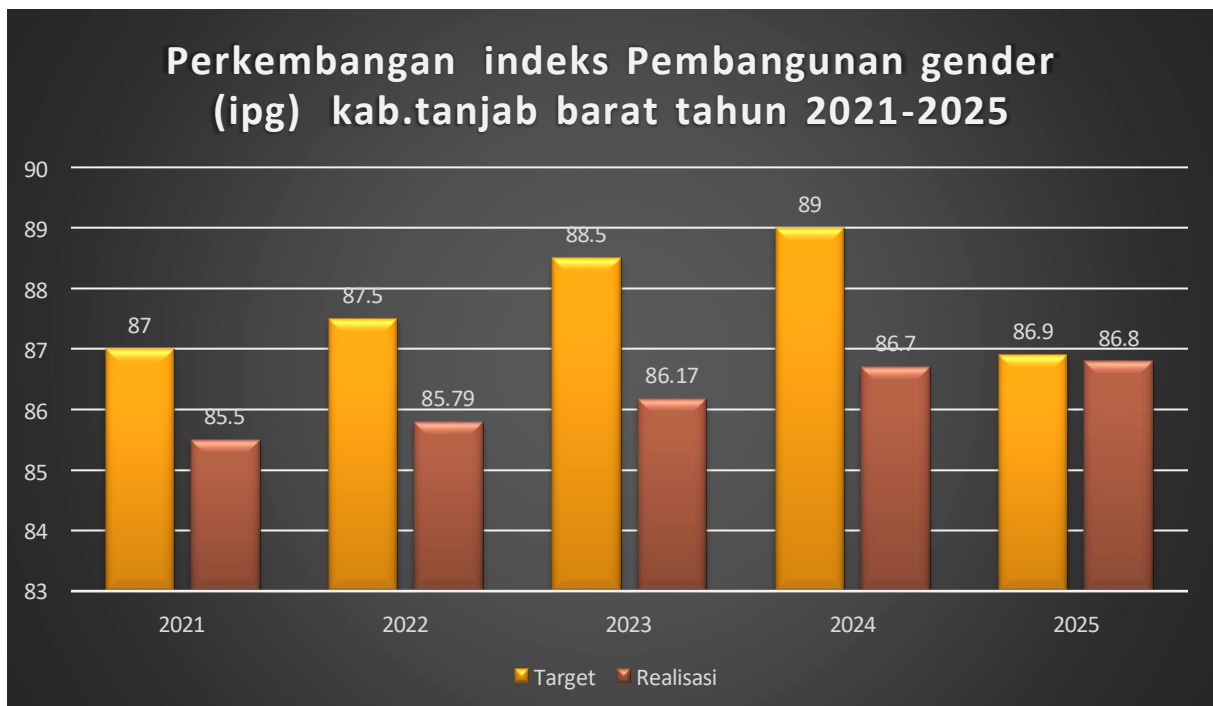
PUG mendorong kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan serta aspirasi perempuan dan laki-laki, ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Kesetaraan gender dapat diartikan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan juga mempunyai hak dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender dilakukan agar tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki kontrol artinya adalah mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan dan sumber daya sehingga tidak ada lagi beban ganda, subordinasi, marginalisasi, serta kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

A. Capaian Indikator Kinerja

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah), dan ekonomi (Produk Nasional Bruto per kapita). IPG digunakan sebagai IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB karena indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam menurunkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Semakin tinggi angka IPG (mendekati 100) maka semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi. IPG dihitung berdasarkan data IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2025 (analisis data tahun 2024). Oleh karena itu IPG menunjukkan kesenjangan kualitas hidup antara Perempuan dan laki-laki. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.



Gambar 3.7 Perkembangan IPG Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. IPG di Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 sebesar 86,8 mengalami peningkatan (0,1 poin) dibandingkan tahun 2024 sebesar 86,7, bukan angka kenaikan yang signifikan. Peningkatan nilai IPG disebabkan peningkatan IPM perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki sehingga kesenjangan menurun 0,1 poin. Dalam kurun waktu 5 tahun realisasi target Indeks pembangunan gender (IPG) belum terpenuhi hal ini menjadi pekerjaan dan tanggung jawab yang cukup besar untuk dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB tentang bagaimana menyusun strategi guna mencapai target maksimal untuk IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Target IPG pada perjanjian kinerja tahun 2025 mengalami penyesuaian dari target Renstra tahun 2025, penyesuaian ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dimana capaian IPG belum memenuhi Target Renstra serta penentuan target ini berdasarkan proyeksi perhitungan IPG.

Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,90	86,90	86,8	99,88	99,88

Peningkatan IPG ini dapat terlihat dari capaian dimensi dan indikator-indikator pembentuknya. Beberapa indikator pembentuk IPG adalah 1) Usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan 2) Harapan Lama Sekolah antara laki-laki dan perempuan 3) Rata – rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Ketidaksetaraan gender masih terdapat pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Pada bidang pendidikan, masih banyak keluarga yang memilih berinvestasi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini mengakibatkan jumlah anak perempuan yang tidak sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada bidang kesehatan juga masih menjadi perhatian hal ini bisa dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam program alat/cara kontrasepsi dalam peningkatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, adanya tantangan terkait ajaran agama, norma, dan nilai-nilai budaya. Sementara itu, pada bidang ekonomi, tenaga kerja perempuan masih memegang pekerjaan informal, tidak tetap, dan tingkat upah yang rendah. Pada bidang politik, suara dan kehadiran perempuan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari posisi perempuan dalam kepemimpinan di pemerintahan maupun di parlemen yang masih rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) antara provinsi di Indonesia masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah-daerah timur Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki IPG tertinggi (95,24) sedangkan Provinsi Papua memiliki IPG yang terendah (81,64).

Pada tahun 2024, capaian IPG secara nasional adalah 91,85 namun, masih terjadi disparitas capaian IPG antar provinsi. Untuk Propinsi Jambi IPG Tahun 2024 adalah 89,50. Ada selisih 2,35 poin lebih rendah dari capaian nasional, dan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 86,8 artinya 2,7 poin dibawah capaian IPG Propinsi Jambi. Diperlukan strategi untuk meningkatkan nilai IPG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Strategi tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan kolaborasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dengan mempertimbangkan isu gender pada tujuh proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator Kinerja

Dalam upaya meningkatkan IPG serta meningkatkan komitmen Daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019 tentang Mekanisme Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai acuan bagi pemerintahan daerah untuk mengukur perspektif Gender dalam materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Instrumen Hukum Lainnya.

2. Menyusun program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok perempuan rentan yang komprehensif, rekomendasi kebijakan pelaporan dalam penyelenggaraan PUG.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis/ sosialisasi/ advokasi kepada seluruh OPD dan Kecamatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait pelatihan PUG dan PPRG untuk penyusunan GAB dan GBS Organisasi Perangkat Daerah.
4. Percepatan Revitalisasi PUG yang dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan yang meliputi prasyarat PUG (kelembagaan, SDM, data terpilah), Penyelenggaraan PUG (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan) serta inovasi PUG di daerah.
5. Pelatihan SDM pendamping melalui pelatihan fasilitator perempuan berdaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

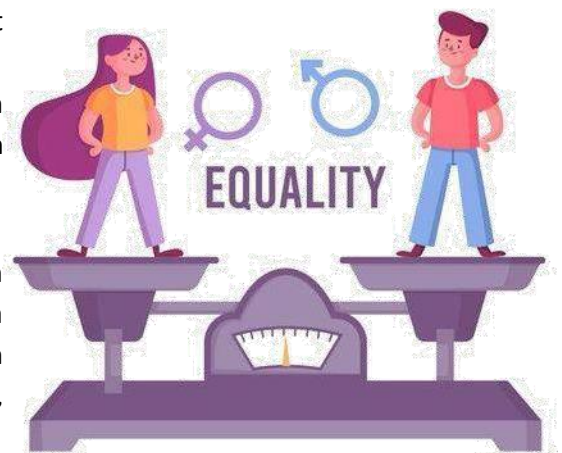
Pencapaian target kinerja IPG masih mengalami kendala-kendala antara lain:

1. Belum adanya pedoman penyelenggaraan PUG
2. Belum maksimalnya sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IPG
3. Belum semua OPD dan Kecamatan optimal dalam penyelenggaraan PUG dan penyusunan ARG

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2026 antara lain

1. Mempercepat kebijakan terkait PUG sehingga dapat menjadi acuan daerah dalam melaksanakan standarisasi.
2. Sinergitas dan kolaborasi kebijakan, program dan kegiatan dengan melibatkan seluruh OPD dan stake holder lainnya
3. Memfasilitasi penyusunan Kegiatan responsif gender
4. Meningkatkan pemahaman Lembaga masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat, Masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



3.2.1.2 Indikator Kinerja 2 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Diskriminasi gender dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia mengadopsi pendekatan pembangunan berorientasi kesetaraan dan keadilan gender, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan upaya sistematis melalui:

- Regulasi: Penyusunan kebijakan dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender.
- Program: Inisiatif praktis untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor.
- Kebijakan: Integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Upaya ini bertujuan memastikan partisipasi setara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, sekaligus mengurangi kesenjangan yang timbul akibat diskriminasi gender.

Indek pemberdayaan Gender : Menilai keberhasilan peran perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, melalui ;

- a. Politik: proporsi keterwakilan perempuan di parlemen.
- b. Pengambilan keputusan: proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi.
- c. Ekonomi: Kontribusi pendapatan perempuan terhadap perekonomian.

Semakin tinggi IDG (mendekati 100) maka semakin baik kondisi pemberdayaan gender di Tanjung Jabung Barat.

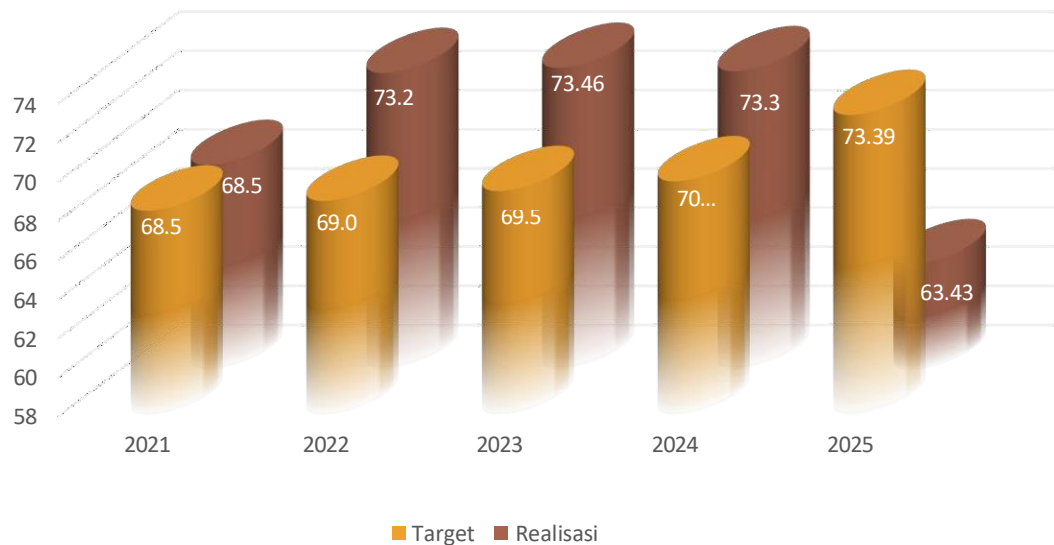
Tabel 3.6 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,39	73,39	63,43	86,42	86,42

A. Capaian Indikator Kinerja

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia makin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berarti, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis. Dimensi pengambilan keputusan didasarkan pada proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi. Terakhir, dimensi distribusi pendapatan dinilai dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

PERKEMBANGAN IDG TAHUN 2021-2025 KAB.TANJUNG JABUNG BARAT



Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021 - 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dalam 4 tahun terakhir, IDG di Tanjung Jabung Barat menunjukkan peningkatan sejak tahun 2021 dari angka 68,5 pada tahun 2021 telah meningkat menjadi 73,3 pada tahun 2024 tetapi terjadi penurunan kembali pada tahun 2025 di angka 63,43. Peningkatan capaian IDG per tahun berkisar antara 5 poin, tetapi menurun kembali sampai 10 point di tahun 2025. Pencapaian IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut belum tercapai sesuai dengan target perjanjian kinerja dengan capaian sebesar 73,19, hal ini , hal ini mengakibatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menduduki ranking 7 dari 11 kabupaten di Propinsi Jambi.

B. Hambatan rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender

Beberapa faktor penyebab rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender antara lain

- Keterwakilan di Bidang politik dan keterwakilan publik. Masih rendahnya parrtisipasi dan keterwakilan perempuan di sektor Parlemen (DPRD) yang belum mencapai 30% serta persentase perempuan dalam jabatan manajerial dan kepemimpinan di pemerintahan yang masih rendah.
- Kurangnya Dukungan dari partai politik dan sistem sosial yang ,masih menganggap poitik sebagai ranah dominasi laki-laki
- Partisipasi Ekonomi dan Pendapatan. Data yang didapat dari BPS masih terdapat kesenjangan untuk tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin.

Untuk mendorong peningkatan IDG harus memenuhi tiga indikator: 1). partisipasi perempuan di parlemen (politik), 2) keterlibatan dalam jabatan profesional (pengambilan keputusan), dan 3).kontribusi pendapatan (ekonomi). Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan akses perempuan di ruang publik, meski pemerataan capaian masih menjadi tantangan.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator Kinerja

Dalam upaya meningkatkan IDG serta meningkatkan komitmen Daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen

- Upaya afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk:
 - Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
 - Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga di desa
 - Mendorong minat perempuan dalam pencalonan di tingkat legislatif maupun desa sebagai kepala desa.
 - Memperkuat komitmen penentu kebijakan dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program prioritas RPJMD untuk mendukung Program peningkatan Kesetaraan Gender. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepemimpinan perempuan agar mereka memiliki akses yang sama dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Hal ini akan memastikan perempuan mendapat manfaat yang setara dengan laki-laki dari pembangunan desa sampai perkotaan. Sasaran kegiatan kelompok masyarakat dan organisasi perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan keterwakilan dan kepemimpinan perempuan, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, dan mewujudkan kesetaraan gender yang berkeadilan. Pada 2025, kegiatan yang dilaksanakan berupa seminar Nasional dengan tema “Sinergi Lintas sektor membangun desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) dalam mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah Madani menuju Indonesia Emas 2045”

2. Peningkatan Sumbangan Pendapatan Perempuan

upaya strategis yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan pendapatan perempuan, melalui :

- Menginisiasi model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan, seperti perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, dan perempuan kepala keluarga, di 5 kecamatan di Tanjung Jabung Barat. Program ini bertujuan menumbuhkan minat berwirausaha, mengembangkan calon wirausaha menjadi wirausaha pemula, dan akhirnya menjadi wirausaha mapan. Melalui kewirausahaan, perempuan rentan diharapkan mandiri secara ekonomi, berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dilakukan dengan :
 - Pelatihan Keterampilan (enterpreneurship), meningkatkan wawasan serta potensi diri perempuan menjadi perempuan berdaya, pelatihan ini bekerjasama dengna lintas sektor bersama dinas tenaga kerja , jumlah peserta sebanyak 125 orang dari yang berasal dari di 5 kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa dusun mudo, Desa Pulau Pauh, Desa Tungkal I, Desa Teluk Raya, Desa Betara Kanan).

D. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk mencapai target kinerja IDG antara lain :

- Hambatan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Meski ada aturan yang mewajibkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, tidak semua partai mematuhi aturan ini secara substansial. Dalam beberapa kasus, kuota ini hanya dipenuhi secara administratif tanpa memastikan kandidat perempuan benar-benar memiliki peluang untuk terpilih, serta kandidat perempuan sering menghadapi keterbatasan akses ke sumber daya seperti dana kampanye, jaringan politik, dan pelatihan
- Norma-norma sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat terutama di pedesaan seringkali membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembatasan akses ke pelatihan. Stereotip gender yang masih melekat juga dapat menghambat kemajuan perempuan.
- Tidak semua pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip Pengarusutamaan Gender, sehingga implementasi teknisnya dapat mengalami hambatan
- Ketersediaan data dan informasi yang akurat serta terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas. Hal ini menyulitkan dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan yang efektif.
- Kurangnya akses terhadap modal merupakan hambatan utama bagi banyak pengusaha perempuan karena sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya jaminan atau kurangnya pengalaman dalam berbisnis.
- Banyak perempuan penyintas mungkin memiliki tanggung jawab keluarga yang membatasi keterlibatan mereka dalam program peningkatan kapasitas.
- Tidak semua pendamping memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan spesifik perempuan rentan dan penyintas.
- Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan seringkali tidak konsisten, sehingga sulit mengukur dampaknya secara menyeluruh.

E. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2026 antara lain

1. Perlu ditingkatkan pemahaman stakeholder/aparat daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui advokasi, sosialisasi, komunikasi dan edukasi.
2. Mempertimbangkan indikator norma budaya sebagai indikator capaian kinerja bagi Organisasi perangkat daerah dan dinas terkait dalam rencana strategis atau minimal pada program dan atau kegiatan.
3. Memperbaiki mekanisme tata kelola kelembagaan di daerah pada setiap isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (koordinasi antar perangkat daerah, pengarusutamaan gender, pelayanan perlindungan yang belum optimal, dan lain sebagainya).
4. Perlunya perencanaan yang matang untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan daerah melalui musrenbang, penyusunan kajian ilmiah, seminar, sehingga arah pembangunan daerah melalui isu-isu prioritas dapat dilakukan dengan optimal.
5. Mulai mengimplementasikan satu data perempuan dan anak dalam setiap kebijakan, program

dan kegiatan PPPA sehingga intervensi kepada sasaran dapat dilakukan bersama sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (OPD).

6. Menggunakan sumber data basis yang lebih luas cakupannya untuk mengukur indikator kinerja agar lebih berdampak bagi perempuan di Tanjung Jabung barat.
7. Memberlakukan data terpilah (Data Gender dan Anak) berkaitan dengan program dan kegiatan terkait pemberdayaan dan perlindungan anak di setiap dinas terkait
8. Mengefektifkan kolaborasi dengan SDM Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang dimiliki lembaga masyarakat, BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga terkait lainnya untuk edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan.
9. Mengefektifkan kolaborasi kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam organisasi perempuan yang tergabung Gabungan Organisasi Wanita maupun organisasi yang berdiri sendiri.

3.2.1.3 Indikator Kinerja 3 – Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan alat penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan pencapaian atau kerugian akibat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu wilayah . Indeks Ketimpangan gender dihitung menggunakan tiga dimensi utama yaitu ; 1) Diukur melalui kesehatan reproduksi diukur melalui angka kematian ibu saat melahirkan dan angka kelahiran remaja, tingginya kematian ibu menunjukkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sementara tingginya kelahiran remaja sering berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan peluang ekonomi perempuan. 2). Persentase penduduk usia produktif 25 tahun keatas yang berpendidikan menengah keatas, serta keterwakilan di legislatif. Ketimpangan dalam representasi politik menunjukkan perempuan memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan dan Perbedaan tingkat pendidikan dapat membatasi kesempatan perempuan dalam pekerjaan dan kepemimpinan. 3). Tingka partisipasi angkatan kerja (TPAK). Kesenjangan partisipasi kerja mencerminkan hambatan sosial, budaya, atau ekonomi yang dihadapi perempuan. Negara dengan partisipasi kerja perempuan tinggi umumnya memiliki IKG yang lebih rendah.

Dampak Ketimpangan Gender menyebabkan beberapa hal, antara lain ;

1. Penurunan produktivitas ekonomi.
2. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
3. Kualitas kesehatan keluarga yang lebih rendah.
4. Terbatasnya inovasi dan pembangunan sosial.
5. Ketidakadilan dalam akses pendidikan dan pekerjaan.

Sebaliknya, pengurangan ketimpangan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pembangunan manusia.

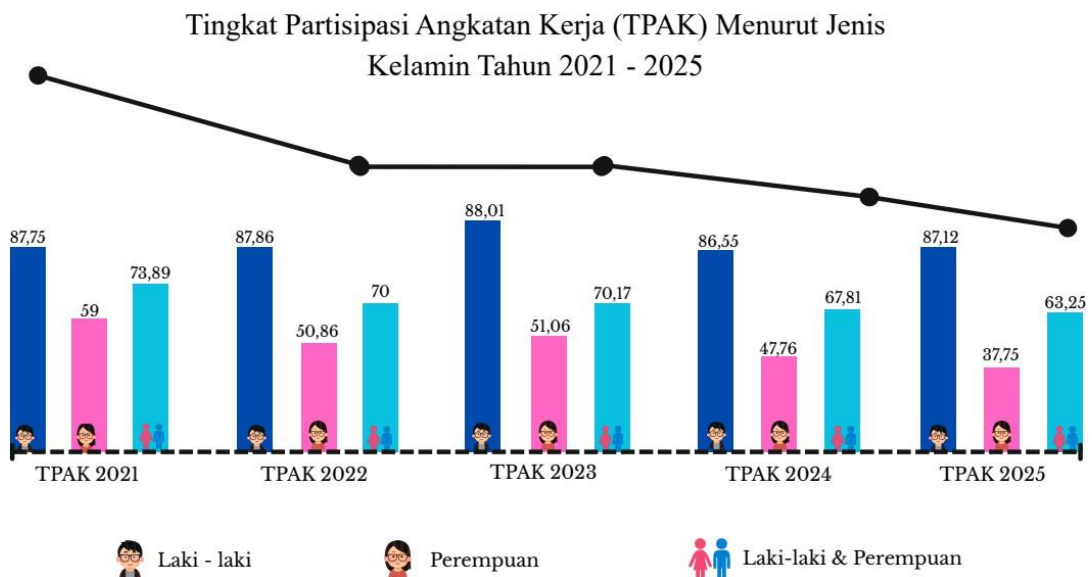
B. Capaian Indikator Kinerja

Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator baru dalam Renstra P3AP2KB tahun 2025 – 2029. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu Indikator untuk mengukur indeks ketimpangan gender adalah TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja . Berdasarkan data BPS Tanjung Jabung Barat terdapat kesenjangan Tingkat partisipasi angkatan kerja dimana

tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar daripada perempuan, Berdasarkan data Statistik tahun 2025 TPAK perempuan sebesar 37,75%. Artinya dari 100 perempuan yang masuk kategori angkatan kerja, sebanyak 37 perempuan bekerja. TPAK Perempuan yang saat ini sebesar 37,75% masih berada dibawah laki-laki dengan persentase sebesar 87,12%. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di sektor tenaga kerja masih tinggi.

Table 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025			
Jenis Kelamin	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	TPAK (%)
Laki-Laki dan Perempuan	159.811	252.647	63,35
Laki-Laki	113.699	130.504	87,12
Perempuan	46.112	122.143	37,75

Sumber ; Dinas Ketenagakerjaan Tanjab Barat, 2025



Gambar 3.13 Perkembangan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021– 2025

Sumber: BPS 2021-2023, Disnaker Tanjab Barat 2024- 2025

Tabel 3.8 Capaian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Ketimpangan Gender	0,54	0,54	0,58	93,10	93,10

Tahun 2025 realisasi Indeks Ketimpangan Gender Tanjung Jabung Barat adalah 0,58% dengan rasio capaian terhadap target adalah 93,10% (Target 0,54%). Salah satu indikator penyebab belum tercapainya IKG Adalah Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntunan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggungjawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan termasuk pada anak. Menurunnya Skor Indeks Ketimpangan Gender menandakan kemajuan dalam progres pengurangan kesenjangan gender. Hal ini menunjukkan bahwa suatu wilayah mencapai perbaikan di bidang-bidang penting seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pencapaian pendidikan dan keterwakilan politik, serta pembentukan partisipasi yang lebih adil di pasar tenaga kerja.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja.

Dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), diperlukan adanya koordinasi dengan berbagai pihak. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025:

1. Penyusunan dokumen GDPK 2025-2045 dan Peta Jalan kependudukan atau Roadmap Ekonomi 2025 sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah dan stakeholder untuk memajukan peran perempuan dan melindungi hak-hak anak dalam ranah ekonomi
2. Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota terhadap 44 OPD termasuk kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

D. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan diperlukan adanya kebijakan-kebijakan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah di bidang ekonomi. Persentase anggaran di OPD pada bidang ekonomi juga sebagian besar belum dilakukan tagging ARG sehingga banyak program dan kegiatan yang belum responsif gender dan anggaran yang netral gender justru berpotensi memperbesar ketimpangan gender. Selain itu, pengolahan data perempuan rentan yang belum optimal di beberapa daerah juga menyebabkan upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan terhambat.

2. Belum optimalnya jaminan ketenagakerjaan sebagai jaminan perlindungan dasar bagi pekerja perempuan. Selain itu, pengolahan data perempuan rentan yang belum optimal di beberapa daerah juga menyebabkan upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan terhambat

E. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

1. Melakukan advokasi kepada OPD yang belum melakukan tagging ARG, termasuk untuk OPD dengan persentase ARG yang masih kecil. Selain itu pendekatan dan audiensi terhadap Kepala OPD terkait juga akan dilakukan langsung untuk meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tagging ARG.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB juga akan terus melakukan berbagai pelatihan di daerah untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, terutama bagi perempuan rentan dan penyintas. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB akan bergerak bersama berbagai lembaga masyarakat untuk memperluas skala pelatihan sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak perempuan di Tanjung Jabung Barat. Berbagai komitmen dan kerjasama juga akan dibangun bersama dunia usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan terutama bagi perusahaan / swasta yang berada di Tanjung Jabung Barat.
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada SDM lembaga Pendamping Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3.2.1.4 Indikator Kinerja 4 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA menjadi target indikator kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN dan RPJMD tahun 2025-2029, dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan anak bagi pemerintah pusat atau daerah.

IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional (RPJMN 2020-2025), provinsi, maupun kabupaten/kota. Sehingga, IPA menjadi indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025-2029 dan menjadi indikator kinerja utama Kepala Dinas P3AP2KB. Semakin tinggi nilai IPA maka semakin baik capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia.

Penyusunan IPA mengacu pada dan terdiri atas lima (5) klaster Konvensi Hak Anak. Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan (5 indikator); Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (4 indikator); Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan (8 indikator); Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (5 indikator); dan Klaster V: perlindungan khusus (5 indikator).

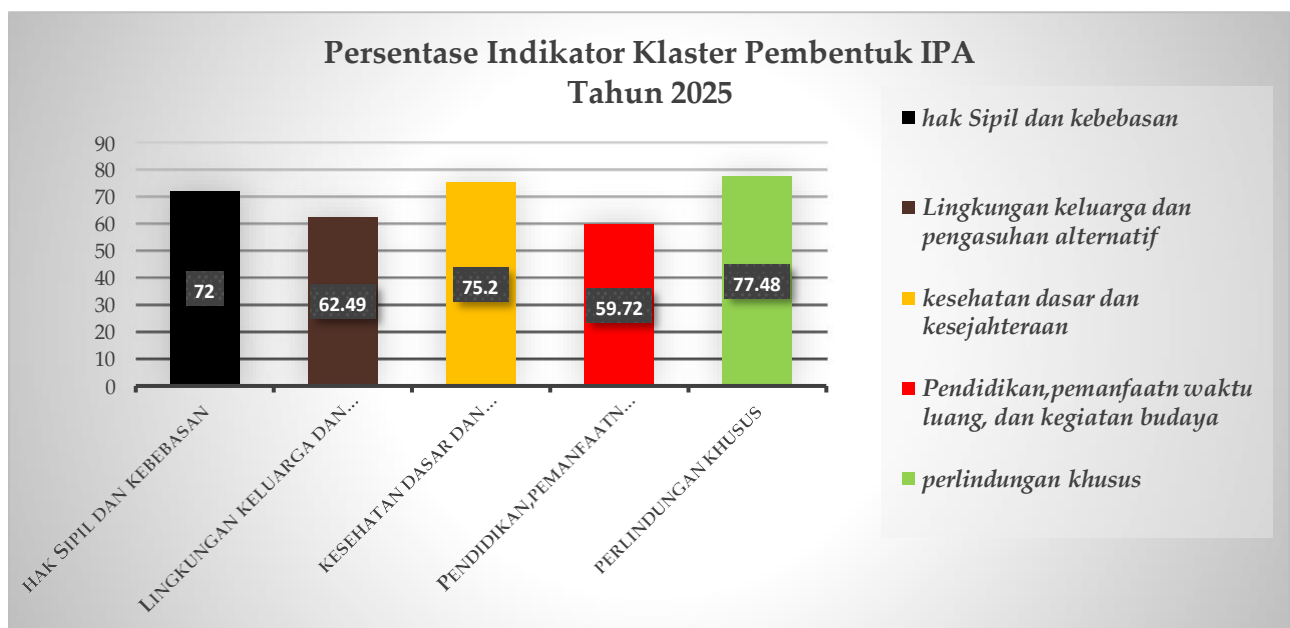
A. Capaian Indikator Kinerja

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator sasaran meningkatnya perlindungan terhadap anak. Pada tahun 2025 capaian IPA sebesar 69,01 dengan rasio capaian 108,72% dari target tahun 2025 sebesar 63,47%. Capaian tahun 2025 tersebut berada 5,54 poin diatas target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB .IPA merupakan indikator kinerja baru pada renstra DP3AP2KB Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.9 Capaian Indeks Perlindungan Anak, Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,47	63,47	69,01	69,01	108,72

Indeks Perlindungan Anak(IPA) dapat mengukur pencapaian keseluruhan perlindungan anak. Indikator penyusunan IPA terdiri dari 5 klaster dan 19 indikator, yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan. 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 5) Perlindungan Khusus. Dilihat perkembangan indeks dari setiap klaster, diketahui bahwa Klaster Perlindungan Khusus mempunyai capaian tertinggi dan klaster Pendidikan,pemanfaatn waktu luang, dan kegiatan budaya (Kluster 4) berada pada capaian tersendah dari 5 kluster . Hal ini menjadi perhatian khusus dinas P3AP2KB untuk menyusun rencana dan strategi guna meningkatkan capaian pada klaster tersebut, bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam tim Kabupaten layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibawah ini adalah diagram yang menunjukan persentase indikator nilai klaster pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) .



Gambar 3.16 Persentase 5 Klaster Acuan IPA

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, (Booklet KemenPPA) Hasil IPA, IPHA, IPKA Tahun 2024 publikasi tahun 2025

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya terkait perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan pada perangkat daerah dan *Stakeholders* terkait. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan perlindungan anak adalah:

1) Melakukan advokasi

- a. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan anak-anak korban mendapatkan haknya
- b. Melakukan Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam upaya pencegahan perkawinan anak yaitu optimalisasi kapasitas anak (memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan), lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak (menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak), aksesibilitas dan perluasan layanan (menjamin anak mendapatkan layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak), penguatan regulasi dan kelembagaan, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan
- c. Berpartisipasi pada advokasi program penurunan stunting nasional meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB bukan sebagai pihak yang menjadi leading sektornya, Program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berfokus pada perubahan perilaku, peningkatan pemahaman dan peningkatan peran masyarakat terutama anak dan keluarga tentang pentingnya upaya pemenuhan hak gizi seimbang bagi anak dan ibu.
- d. Membuat Edaran tentang penyediaan ruang ASI untuk ibu pekerja usia produktif bagi Instansi pemerintah dan swasta.
- e. sanitasi sebagai indikator KLA kepada Pemda agar menaruh perhatian terhadap sanitasi bagi keluarga
- f. Melaksanakan Pendampingan kepada orangtua dan anak korban kekerasan dalam kegiatan parenting dan trauma preventing untuk AMPK
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mendorong puskesmas melakukan penjangkaran ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap.

2) Melakukan sosialisasi:

- a. Peningkatan akses anak atas informasi yang layak dengan membuat perpustakaan aman dan nyaman untuk anak melalui PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak).
- b. Peningkatan fasilitas kesehatan melalui Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas serta mendorong pencegahan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- c. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal untuk menambah gizi anak dan keluarga melalui program DRPPA Tematik, dan akan menuangkannya dalam peraturan Bupati tentang “Kampung Berkah Madani”
- d. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai isu kesehatan dan pendidikan anak di Ikab.Tanjung Jabung Barat.
- e. Anjuran Kepada Sekolah untuk Penyediaan Pangan Jajan Anak Usia Sekolah di Sekolah Ramah Anak (SRA)

- f. Bahaya Rokok, Narkoba dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam melakukan kampanye bahaya rokok khususnya bagi anak. Sasaran program ini adalah Forum Anak Daerah, siswa SMP dan sederajat, siswa SMA

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

Pencapaian IPA mengalami kendala-kendala antara lain

- 1) Nilai Klaster yang terdah adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hal ini masih terjadi karena pada anak-anak usia 5 -17 Tahun juga masih cenderung memanfaatkan internet sebagai ajang mengakses konten hiburan;
- 2) Untuk semakin meningkatkan akses internet pada anak usia 5 - 17 tahun diluar sebagai hiburan, butuh sinergitas dari orangtua, masyarakat dan juga pemerintah.
- 3) Faktor yang ditenggarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi Kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal)

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Upaya terkait perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan baik di Kementerian/Lembaga, Daerah dan Stakeholders terkait. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan perlindungan anak adalah:

- 1) Mengintegrasikan pelatihan Konvensi Hak Anak dengan lembaga pendidikan.
- 2) Deklarasi Sekolah ramah Anak (SRA) Ke pondok pondok pesantren Di Tanjung Jabung Barat
- 3) Membuat materi KIE yang mudah dipahami oleh anak sesuai tingkatan usia, orang tua, dan orang dewasa lainnya melalui media-media konvensional.
- 4) Bekerjasama dengan lembaga pemerhati anak yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat di tingkat akar rumput untuk memberikan pendampingan dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak agar sesuai dengan standar.
- 5) Melakukan advokasi dan pendampingan Gugus Tugas KLA dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- 6) Melakukan Upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat.
- 7) Penguatan dan pengembangan Forum Anak di daerah
- 8) Pembangunan komitmen daerah dalam pemenuhan hak bermain anak melalui penyediaan sarana prasarana Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA yang terstandarisi
- 9) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga masyarakat melalui forum PUSPA, genre, dan lainnya.

3.1.1.1. Indikator Kinerja 5 – Rasio Kekerasan Terhadap perempuan

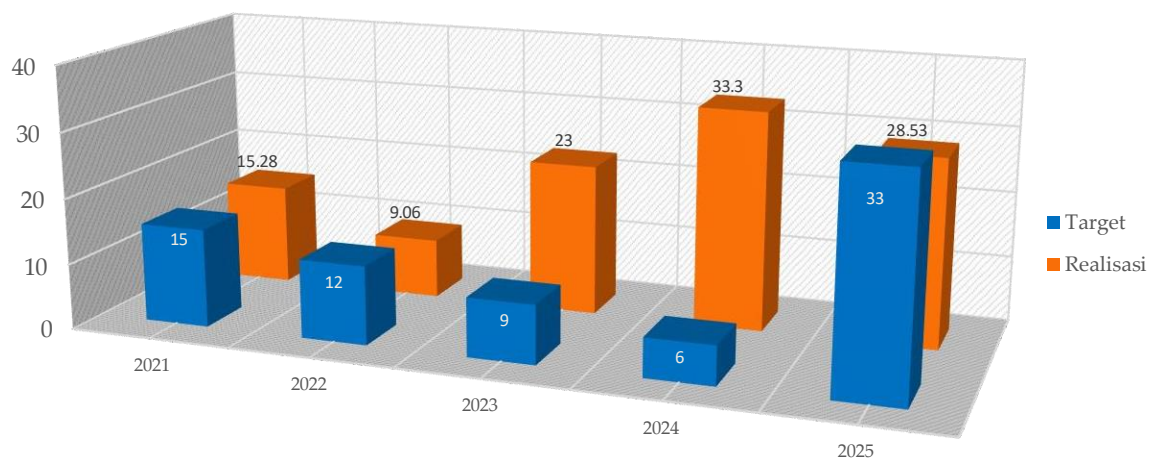
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan merupakan persentase perempuan pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah yang mengalami kekerasan. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dapat dihitung melalui jumlah perempuan korban kekerasan fisik dan/atau seksual usia 15 sampai 64 dalam 12 bulan terakhir atau sepanjang hidupnya dibagi jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan perbandingan. Semakin kecil angka prevalensinya menunjukkan bahwa angka kekerasan semakin menurun.

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada Perempuan. Pengertian Kekerasan oleh pasangan (*intimate partner violence*) seperti suami, pasangan yang hidup bersama (tidak menikah), pasangan seksual, tinggal terpisah, dan mantan suami. Sedangkan Kekerasan oleh selain pasangan adalah siapapun selain pasangan, seperti ayah, ibu, saudara, rekan kerja, teman, dan orang lain yang tidak dikenal.

A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan data pelayanan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan perempuan dan Anak (UPT PPA) Kab Tanjung Jabung Barat menunjukkan data yang bersifat fluktuatif sejak dalam 5 tahun terakhir. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan atau bukan pasangan dalam setahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan target RPJMD 2021-2025 telah tercapai.

RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021-2025 KAB.TANJUNG JABUNG BARAT



Tabel 3.18 Perkembangan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, 2021-2025

Sumber : DP3AP2KB Tanjab Barat (UPT PPA)

Berdasarkan data Rasio KtP tahun 2024 terdapat kesenjangan antara target dan realisasi hal ini terjadi karena angka kekerasan yang terjadi pada tahun 2024 cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada target tahun 2025. Pada tahun 2025 , dalam setahun terakhir, sebanyak 28,53% perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik,psikis, prilaku menyimpang dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di pedesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja.

Capaian terkait indikator kinerja Rasio KtP yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2025 ini berdasarkan hasil Pelayanan UPT PPA dan Laporan masyarakat secara langsung ataupun melalui SIMFONI. Jika melihat dari capaian tahun 2025 rasio KtP mengalami penurunan 4.5 point dari target 2025 (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Capaian Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	33	33	28,53	115,67	115,67

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan dilaporkan di Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2025 dapat diklasifikasi menjadi beberapa kasus yaitu ;

1. Kekerasan seksual
2. Kekerasan Fisik
3. Kekerasan Psikis
4. Disabilitas
5. Penelantaran
6. Perilaku Menyimpang

Data Rasio kekerasan terhadap perempuan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan mengalami penurunan, baik selama hidup dan setahun terakhir. Selain itu, pembatasan aktivitas oleh pasangan masih menjadi jenis kekerasan dengan prevalensi terbesar yaitu 32,4% pada tahun 2016, 22,3% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2024 yaitu 21.5%.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Data Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam SPHPN 2024 indikatornya dengan mengukur proporsi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau pembatasan aktivitas oleh pasangan serta kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam lingkup rumah tangga.

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan usia 15-64 tahun dalam setahun terakhir yang tinggal di perkotaan (21,4 persen) cenderung mengalami KDRT yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan (19,2 persen).

Secara nasional, prevalensi perempuan yang mengalami KDRT menurun sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Lingkup Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak termasuk juga orang yang mempunyai hubungan keluarga (darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian) dan menetap.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB ditahun 2025 untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yaitu:

1. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait Kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus.
2. Melakukan advokasi, bimbingan teknis bagi Lembaga perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus yang responsif gender.
3. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)
4. Advokasi peningkatan perlindungan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Dinas di daerah
5. Melaksanakan revitalisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)
6. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi dalam dan luar daerah dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
7. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga layanan serta penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan
8. Meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi dengan melakukan pengumpulan data secara berkala dan sesegera mungkin setelah memberikan pelayanan

C. Kendala-kendala dalam mencapai kinerja

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO yaitu:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan di Daerah
- 2) P2ATP2A belum berjalan maksimal
- 3) Adanya perbedaan dalam pemahaman terkait layanan rujukan akhir dan layanan yang diberikan di masing-masing tingkat penyedia layanan

D. Rencana Tindak Lanjut tahun berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2026 antara lain:

- (1) Melanjutkan bimbingan teknis dan advokasi kepada perangkat Daerah di Kab.Tanjung Jabung Barat sebagai upaya terus secara terstruktur dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman terkait substansi perlindungan hak perempuan.
- (2) Melaksanakan KIE secara masif mengenai perlindungan hak perempuan kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi peningkatan literasi kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Meningkatkan kualitas pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui pengembangan SDM pemberi layanan, sarpras layanan dan kerjasama dengan unit layanan di daerah lain dalam propinsi jambi.
- (4) Meningkatkan keterlibatan Lembaga Masyarakat untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan perlindungan hak perempuan.
- (5) Khusus terkait pekerja perempuan, terus mendorong perusahaan dan bersama serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan melalui pembentukan RP3 di perusahaan.
- (6) Meningkatkan Layanan UPTD PPA .

3.2.1.5 Indikator Kinerja 7 – Angka Total Kelahiran/(Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun

TFR adalah indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi. TFR mempresentasikan rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki oleh setiap perempuan sepanjang hidupnya. TFR ideal bagi sebuah negara untuk menjaga kestabilan populasi (tanpa pertumbuhan atau penyusutan) adalah sekitar 2,1 anak per wanita. Angka yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan rendahnya usia pernikahan dan tingkat pendidikan. Nilai TFR didapat dari penjumlahan tingkat kelahiran menurut kelompok umur tertentu (Age Spesific Fertility Rate atau ASFR) dikalikan 5 kemudian dibagi 1000. Jika suatu wilayah memiliki tfr 2,3 artinya rata-rata seorang wanita di wilayah tersebut melahirkan 2 hingga 3 anak seumur hidupnya. Faktor penentu tinggi rendahnya angka kelahiran pada kelompok usia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama :

- Usia Perkawinan Pertama, wanita yang menikah pada usia lebih muda cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak.
- Pendidikan dan Partisipasi Kerja, semakin tinggi pendidikan wanita dan semakin aktif mereka didunia bekerja, angka kelahiran cenderung menurun
- Penggunaan alat kontrasepsi, Akses dan partisipasi dalam program keluarga berencana (KB) sangat menekan angka kelahiran.
- Pendapatan dan kondisi Ekonomi. Tingkat pendapatan keluarga mempengaruhi keputusan mengenai jumlah anak.

A. Capaian Indikator Kinerja

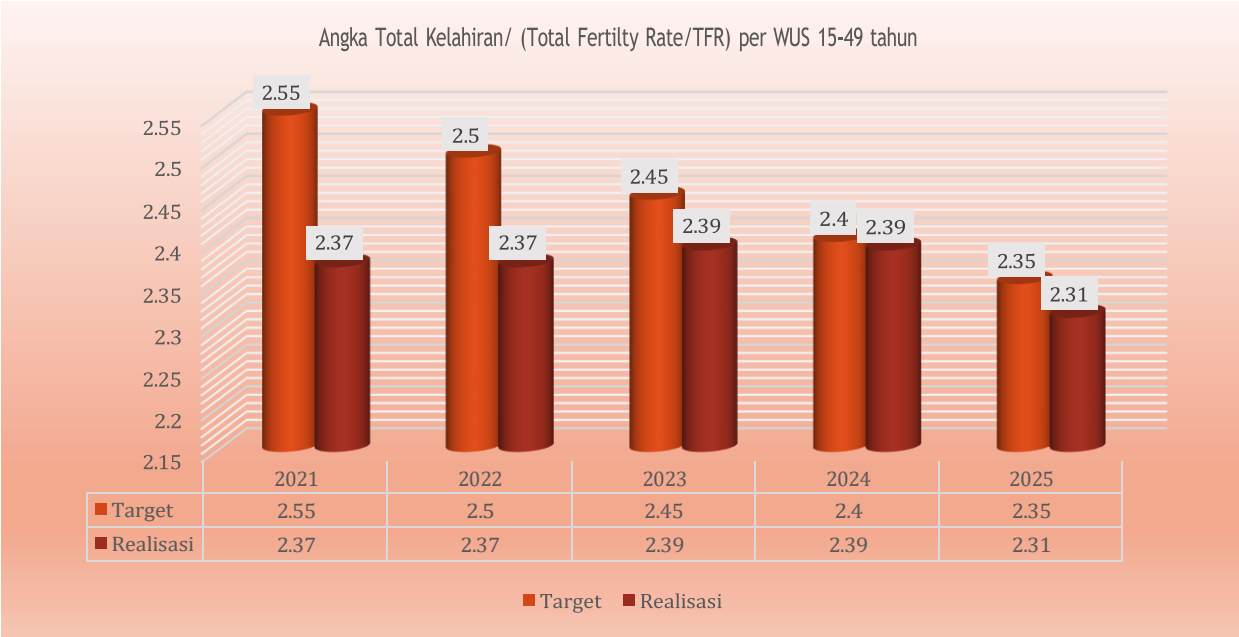
Pada tahun 2025 angka Total Kelahiran /Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan sebesar 2.4 kelahiran per wanita usia subur dengan realiasi capaian 2.31 pada tahun 2025 (*Sumber data*

BPS/SP 2020). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang di lakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026. Capaian terkait indikator TFR disajikan yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2025 ini berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 dan data BPS 2025. Jika melihat dari capaian tahun 2025 angka TFR telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 dan meningkat sebesar 0,4 point (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Capaian Angka Total Kelahiran /Total Fertility Rate(TFR) per WUS 15-49 tahun
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Total Kelahiran /Total Fertility Rate(TFR) per WUS 15-49 tahun	2,35	2,35	2,31	101,70	101,70

Gambar 3.18 Perkembangan Angka Total Fertility Rate (TFR) dalam 5 tahun terakhir 2021- 2025



Sumber: DP3AP2KB

Dari data diatas diketahui bahwa Angka Total Fertility Rate (TFR) dalam 3 tahun terakhir telah mendekati target salah satunya pada tahun 2024 realisasi capaian target 2,39 dan tahun 2025 mencapai 2,31, (ada penurunan posotof 0,8 poin) dari tahun sebelumnya. hal ini mengindikasikan bahwa program kegiatan yang terkait dengan indikator penurunan angka total fertility rate (TFR)/ angka total kelahiran perempuan usia 15-49 telah baik, perlu dipertahankan dan ditingkan kembali dengan rencana kerja di tahun berikutnya.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan pernikahan anak, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesetaraan gender serta optimalisasi program keluarga berencana. Langkah yang dilakukan ;

1. Melaksanakan KIE tentang penggunaan alat kontrasepsi yang aman.
2. Mencegah pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga
3. Melakukan kerjasama lintas sektor terkait pendidikan tentang siaga kependudukan, dan memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan karena tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kesadaran merencanakan sebuah keluarga berkualitas
4. Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan PLKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas

C. Kendala yang dihadapi dalam mencapai Target

Tahun 2025 Target Total Fertility Rate (TFR) 2,35 telah mencapai realisasi angka 23,7 dengan rasio capaian 101,70% artinya TFR cenderung berada di Trend Positif dan tidak ada kendala signifikan dalam pencapaian target TFR tahun 2025. Keberhasilan strategi pelayanan KB dengan “jemput bola” atau mendatangi langsung akseptor dan calon akseptor.

D. Rencana Tindaklanjut Tahun Berikutnya

Sebagai upaya tindak lanjut dan peningkatan kinerja pada Tahun Anggaran 2026, Bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Strategi "Klinik Data" Berkala: Melaksanakan evaluasi data (rekonsiliasi) setiap bulan—bukan lagi per semester—antara Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan Admin Kabupaten untuk meminimalisir *gap* (kesenjangan) antara kegiatan riil dengan laporan yang masuk di sistem aplikasi.
2. Intensifikasi KIE pada Akseptor Non-MKJP: Untuk meningkatkan kembali capaian mCPR, bidang akan fokus pada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada akseptor suntik dan pil agar beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD/Implan/MOW), yang terbukti memiliki tingkat putus pakai (*drop out*) lebih rendah.
3. Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK): Mengubah pola kerja TPK dari sekadar "pelapor" menjadi "pendamping aktif". Fokus utama adalah memastikan setiap Calon Pengantin (Catn)

dan Ibu Hamil benar-benar mendapatkan edukasi pencegahan stunting, serta memastikan pendampingan tersebut terinput 100% ke dalam Elsimil.

4. Revitalisasi Kampung KB: Mendorong 134 Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah terbentuk untuk tidak hanya aktif secara administrasi, tetapi juga memiliki program unggulan nyata, seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang mandiri dan berkelanjutan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

3.2.1.6 Indikator Kinerja 8 – Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) atau **Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur** adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 perempuan pada rentang usia tertentu dalam periode satu tahun. Indikator ini sangat penting untuk memahami pola kesuburan pada setiap fase usia reproduksi perempuan. ASFR digunakan untuk

1. **Mengukur Fertilitas:** Mengidentifikasi kelompok usia mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka kelahiran.
2. **Proyeksi Penduduk:** Menjadi data dasar penting untuk memproyeksikan jumlah serta struktur penduduk di masa depan.
3. **Evaluasi Kebijakan:** Membantu pemerintah mengevaluasi program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok usia remaja (seperti kelompok 10-14 tahun atau 15-19 tahun)

A. Capaian Indikator Kinerja

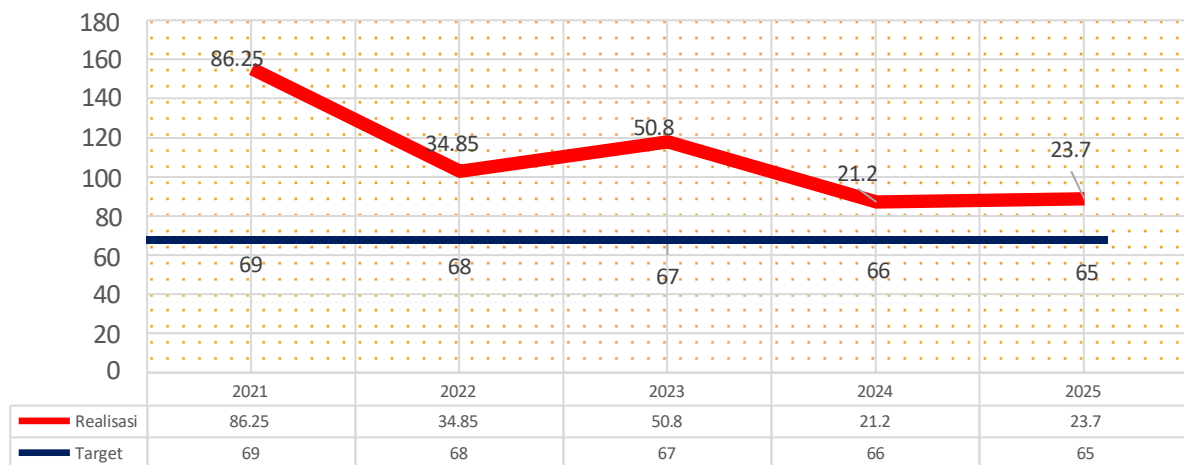
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi fisik yang dicapai sampai dengan Desember 2025

Tabel 3.11 Capaian Indikator ASFR Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra 2025 (%)
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-49 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	65	65	23.7	274,2	274,2

Secara umum, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terutama pada indikator pengendalian populasi penduduk. Indikator yang bersifat negatif (semakin kecil angkanya semakin baik capaiannya). ASFR termasuk indikator yang bersifat negatif, dan melampaui target secara signifikan (274,2%). Tren data ASFR selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025) sebagaimana ditampilkan dalam gambar dibawah ini .

Grafik Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)



Gambar 3.12 Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun) Tahun 2021-2025

Sumber ; DP3AP2KB Kab.Tanjab Barat

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menurunkan angka Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menurunkan ASFR tahun 2025 antara lain:

- 1) Memperkuat sinergi dengan Pengadilan Agama dan KUA untuk memberikan aturan yang lebih ketat terkait dispensasi nikah khususnya untuk usia pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan usia dibawah 19 tahun dikategorikan sebagai pernikahan anak dibawah umur.
- 2) Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya melalui optimalisasi kader penggerak PPKBD dan Sub-PPKBD sebagai perpanjangan tangan penyuluh, sehingga jangkauan pelayanan tetap luas meskipun dengan anggaran operasional yang terbatas.
- 3) Kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan KB

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

- Secara Umum Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 tahun) Per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu ditekan, meskipun angka 23,7 tahun 2025 masih jauh dibawah toleransi target tahun 2025 (65) terjadi kenaikan 2,5 poin dibanding tahun lalu, hal ini bisa terjadi dikarenakan perbaikan pencatatan kelahiran remaja yang sebelumnya tidak terdata.
- Masih ada perkawinan usia Dini, hal ini terjadi karena masih ada perdebatan tentang usia pernikahan antara pemerintah dengan tokoh setempat yang masih mengizinkan pernikahan usia anak karena beberapa faktor .

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2026 antara lain:

- 1) Mempekuat sinergai dengan Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan KUA dalam pemberian dispensasi nikah.
- 2) Melanjutkan kegiatan yang mengikutsertakan GenRe dalam bentuk edukasi GenRe di sekolah-sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3) Sosialisasi Pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk meningkatkan kualitas keluarga.

3.2.1.7 Indikator Kinerja 9 – Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Unmet need adalah kondisi di mana wanita usia subur (berstatus menikah) yang subur dan aktif secara seksual ingin menunda kelahiran anak (selama dua tahun atau lebih) atau tidak ingin memiliki anak lagi, namun tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi apapun. Kategori Unmeet Need adalah 1). Ingin menunda (Menjarangkan) yaitu wanita yang ingin menunda kelahiran anak berikutnya minimal dua tahun, tetapi tidak ber-KB. 2) Tidak ingin anak lagi yaitu wanita yang sudah merasa cukup memiliki anak dan tidak ingin punya anak lagi, tapi tidak ingin ber-KB. Tingginya angka unmeet need beresiko beresiko tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan berdampak pada masalah kesehatan ibu, resiko komplikasi hingga meningkatnya angka kematian IBU (AKI). Penyebab umum unmeet need biasanya terjadi akibat takut pada efek samping alat kontrasepsi atau kurangnya pengetahuan.

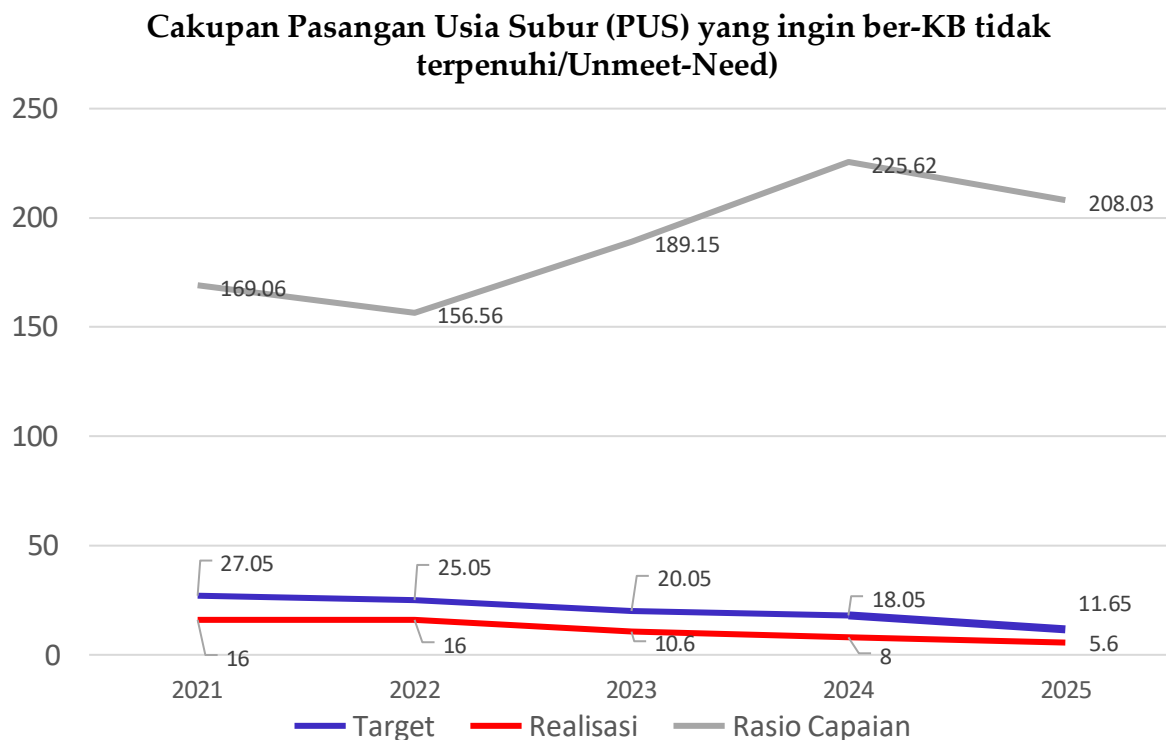
A. Capaian Indikator Kinerja

Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB tahun 2025 pada indikator angka unmet need di tanjung Jabung Barat telah terpenuhi dengan rasio capaian 153,6% . Semakin rendah nilai unmeet need maka semakin baik penyelenggaraan program Keluarga Berencana, maksudnya adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jika Unmeet need Masih tinggi patut diduga berkontribusi terhadap landainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dimana program KB merupakan salah satu upaya penurunan AKI di bagian hulu. AKI dapat disebabkan oleh terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada ibu. Kehamilan yang tidak diinginkan pada ibu dapat mendorong perilaku mencari pelayanan kesehatan yang tidak aman seperti aborsi.

Tabel 3.13 Capaian Unmeet Need Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian Terhadap Renstra 2025 (%)
Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	11,65	11,65	5,6	153,6	153,6

Capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan (Tren Positif) pada indikator unmeet need. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 18.5% dengan realisasi sebesar 8%, sementara tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 11,65% dengan realisasi 5,6% .



Gambar 3.26 Capaian Persentase (%) PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
Tahun 2021-2025

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa secara umum dalam lima tahun terakhir angka unmeet need Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menunjukan hasil yang baik. Indikator unmeet need yang bersifat negatif (Semakin kecil semakin baik) telah melampaui target secara signifikan, terlihat dari rasio capaian setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Untuk meningkatkan capaian indikator Presentase unmeet need dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan pada pelayanan KB keliling yang berkontribusi menekan angka unmeet need
2. Melanjutkan kegiatan BKB HI (Holistik Integratfi) untuk mendukung penurunan stunting an peningkatan kualitas anak.
3. Pelaksanaan Jemoput bola pelayanan KB khususnya ke daerah – daerah pesisir yang sulit dijangkau
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pendataan akseptor KB dengan peningkatan kompetensi pelaporan
5. Kerjasama lintas sektor untuk mempertahankan angka Unmeet need

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Tantangan pada administrasi dan pelaporan digital yang masih sering terdapoat kendala teknis

yang mempengaruhi capaian indikator.

2. Sarana dan prasarana digital yang masih terbatas, saran ini dibutuhkan sebagai dukungan pelaporan langsung oleh tenaga lini lapangan (TPK/PPKBD)

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2026 antara lain:

1. Optimalisasi tim pendamping keluarga (TPK) dengan mengubah pola kerja TPK dari sekedar “pelapor” menjadi “pendamping aktif” .
2. Memastikan setiap calon pengantin dan ibu hamil benar-benar mendapatkan edukasi pencegahan stunting dan stunting
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pendampingan dan pengisian Elsimil (Elektronik Siap nikah siap hamil) yang merupakan aplikasi resmi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berfungsi sebagai alat skrining kesehatan dan media edukasi untuk mencegah stunting

3.2.1.8 Indikator Kinerja 10 – Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)

I Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) adalah alat ukur resmi dari BKKBN untuk mengevaluasi kualitas keluarga di Indonesia. Berfungsi sebagai pelengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), iBangga melihat keberhasilan program keluarga melalui tiga dimensi utama, yaitu;

1. **Faktor dimensi kemandirian (ekonomi dan Kesehatan)**
2. **Faktor Dimensi Ketentraman (Legalitas dan Konflik)**
3. **Faktor dimensi kebahagiaan**

Pembangunan keluarga merupakan isu lintas sektor (Cross cutting issue), artinya menjadi tanggung jawab lintas sektor. DP3AP2KB sebagai organisasi perangkat daerah yang diberikan mandat menjalankan program Bangga Kencana Di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menterjemahkan kebijakan pembangunan keluarga sebagai peningkatan ketahanan keluarga melalui pendekatan siklus hidup dengan cara membentuk langsung kelompok kegiatan (Poktan) yang langsung menyentuh keluarga yang terdiri dari ; Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Nilai I Bangga berkisar antara 0 – 100 dengan kategori ;

- Kurang Baik (Rentan) apabila nilainya dibawah 40
- Cukup Baik (Berkembang) apabila nilainya 40-70
- Baik (Tangguh) apabila nilainya diatas 70

A. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukan nilai 66,68 , termasuk kategori berkembang . capaian ini berdasarkan data BPS Tan kategori cukup Berdasarkan data PK 2020 dan RADALGARM 2025 Indeks Pembangunan keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 belum mencapai rasio 100% , tetapi sudah masuk dalam kategori baik. capaian Indikator Pembangunan Keluarga (I Bangga) telah tercapai dengan **98,9%** , belum tercapai 0,68 point dari target 66,68% Pada Tahun 2025. Hal ini menunjukan bahwasanya ketahanan keluarga semakin menguat dalam arti mandiri, tentram, dan bahagia meskipun berada ditengah tantangan ekonomi global. Data I Bangga didapat berdasarkan data PK tahun 2025

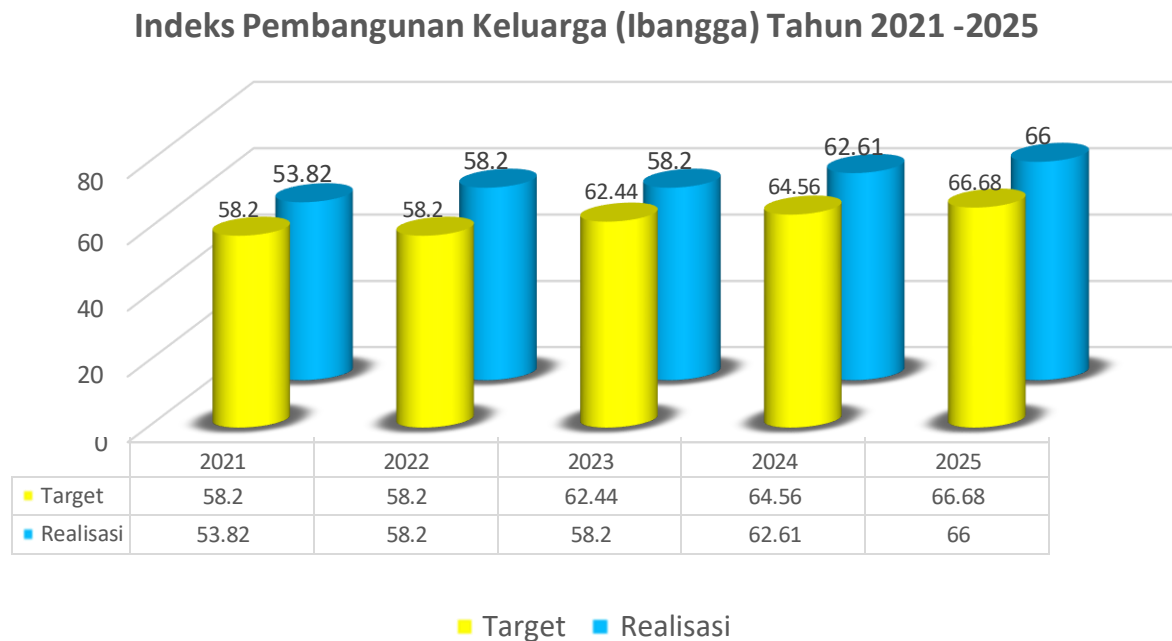
Tabel 3.14 Capaian Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian Terhadap Renstra 2025 (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	66.68	66.68	66	98,9	98,8

Sumber; PK 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Pembangunan keluarga meningkat cukup signifikan .. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 66%, yang menunjukkan bahwa keluarga di Tanjung

Jabung Barat semakin mandiri, tentram, dan bahagia meskipun berada di tengah tantangan ekonomi global. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui intervensi kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL) yang lebih terintegrasi . Hal ini sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini;



Gambar 3.34 Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga
(Tahun 2021 – 2025)

B. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA

Untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan skor iBangga di masa mendatang, perlu menerapkan strategi intervensi berdasarkan tiga dimensi iBangga:

1. Strategi Peningkatan Dimensi KEMANDIRIAN

- Revitalisasi UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor): Memberikan pelatihan kewirausahaan, *packaging* produk, dan akses permodalan bagi kelompok UPPKA agar keluarga akseptor memiliki pendapatan tambahan yang nyata.
- Optimalisasi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting): Memastikan program DASHAT di Kampung KB berjalan aktif untuk menjamin kemandirian gizi keluarga, sehingga kesehatan anak terjamin.
- Pendidikan bagi Keluarga: Mendorong kejar paket (pendidikan non-formal) bagi kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang putus sekolah untuk meningkatkan status pendidikan keluarga.

2. Strategi Peningkatan Dimensi KETENTRAMAN

- Fasilitasi Isbat Nikah Terpadu: Bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dukcapil untuk memfasilitasi Isbat Nikah massal bagi keluarga yang belum memiliki buku nikah, guna meningkatkan poin legalitas hukum keluarga.
- Konseling Keluarga (Puspaga/PPKS): Mengaktifkan peran Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

(PPKS) di Balai Penyuluhan KB sebagai tempat curhat dan mediasi masalah keluarga untuk meminimalisir konflik dan perceraian.

- Pendampingan Keagamaan: Meningkatkan kegiatan ibadah bersama di level keluarga melalui sosialisasi di kelompok pengajian/majelis taklim binaan.

3. Strategi Peningkatan Dimensi KEBAHAGIAAN

- Kampanye "Kembali ke Meja Makan" & "Matikan TV/HP 18.00-21.00": Menggalakkan gerakan sosial agar keluarga meluangkan waktu berinteraksi tanpa gangguan teknologi minimal 3 jam sehari.
- Promosi Rekreasi Edukatif Murah: Mengedukasi masyarakat bahwa rekreasi tidak harus mahal. Kegiatan sederhana seperti kerja bakti rumah, makan bersama di teras, atau olahraga bersama sudah terhitung sebagai rekreasi yang meningkatkan *bonding* keluarga.
- Penguatan Peran Ayah: Melalui kelompok BKB, mendorong peran ayah agar lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan kegiatan rumah tangga, yang terbukti meningkatkan indeks kebahagiaan ibu dan anak.

C. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENCAPAI KINERJA

Kendala yang dihadapi antara lain, secara umum target I Bangga sdh dalam angka yang baik, tetapi duntuk mempertahankan angka tersebut agar tidak mengalami penurunan harus dilakukan koordinasi lintas sektor khususnya kordinasi gugus tugas stunting, jika dilihat ada beberapoa faktor menjadi penyebab naeik atau turunnya nilai I Bangga, antara lain;

Tingkat Kemiskinan: Beban ekonomi dan kemiskinan ekstrem menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kemandirian dan ketenteraman keluarga.

Perkawinan Usia Anak: Masih tingginya angka pernikahan di bawah umur berdampak langsung pada kesiapan mental, ekonomi, dan keharmonisan keluarga.

Akses Layanan dan Edukasi: Kesenjangan geografis di wilayah 4T membuat edukasi *parenting* serta kesehatan reproduksi sulit tersampaikan secara merata.

Akurasi Data: Pelaporan data lapangan sering dihadapkan pada kendala sinkronisasi dan validasi NIK akseptor layanan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN BERIKUTNYA

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2026 antara lain tetap fokus dan melanjutkan

Program utama yang menunjang keberhasilan kinerja bidang meliputi:

Program Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana):

- > Kegiatan BKB HI (Holistik Integratif): Mendukung penurunan stunting dan peningkatan kualitas anak.
- > Kegiatan PIK-R: Menjadi wadah edukasi remaja untuk mencegah kenaikan ASFR yang lebih tinggi.
- > Kegiatan UPPKA: Mendorong kemandirian ekonomi keluarga akseptor.

3.2.1.11 Indikator Kinerja 11 – ANGKA Pemakaian kontrasepsi /MCPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi, yang mencakup semua metode kontrasepsi yang dianggap modern, seperti pil kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, dan metode lainnya. Metode modern dalam mCPR merujuk pada cara-cara pencegahan kehamilan yang bersifat medis atau memerlukan alat, meliputi:

- MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang): IUD/AKDR, Implan, serta Metode Operasi Pria (MOP/Vasektomi) dan Metode Operasi Wanita (MOW/Tubektomi).
- Non-MKJP: Pil KB dan Suntik KB

Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern, dibagi dengan total keseluruhan wanita kawin usia 15-49 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

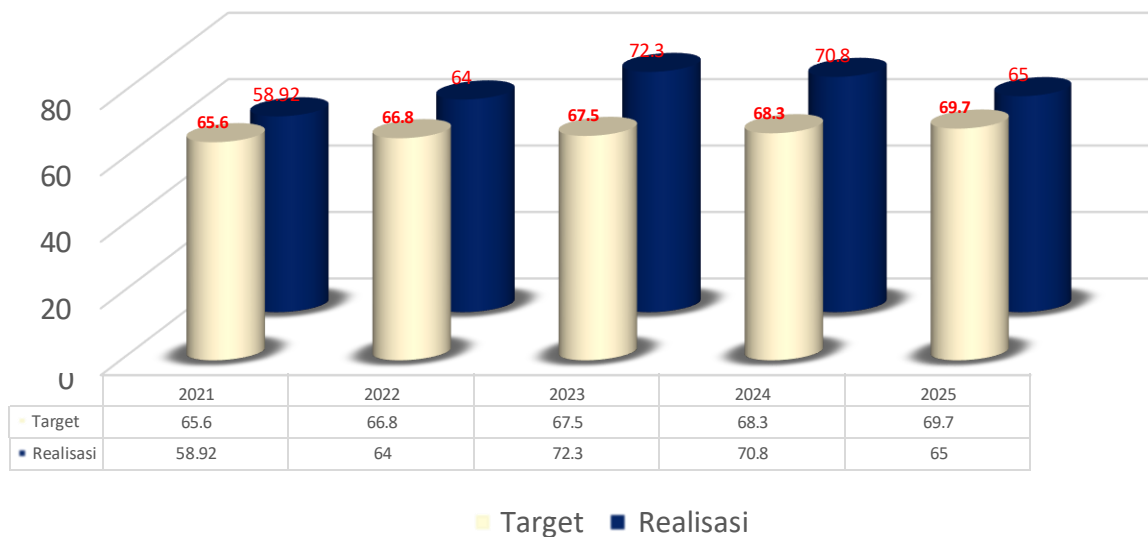
Tabel 3.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 persentase mCPR belum mencapai target seharusnya, dari target yang ditetapkan sebesar 69,79 persen hanya terealisasi sebesar 65 %, dengan rasio 93,25 %.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Pemakaian Kontrasepsi modern /mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Capaian Terhadap Target Renstra 2025 (%)
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	69,70	69,70	65	93,25	93,25

Untuk mengetahui data perkembangan Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) pada wanita menikah usia 15-49 tahun dalam kurun waktu lima tahun (2021 – 2025) dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Angka Pemakaian Kontrasepsi modern /mCPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun



Sumber Data; DP3AP2KB / Radalgram 2025

Dari data diatas diketahui terjadi penurunan capaian dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 5,8 point. Penurunan ini terindikasi akibat proses pemutakhiran data (Data Cleansing) pada sistem SIGA BKKBN, di mana data akseptor pasif dikeluarkan. Selain itu, terdapat PUS yang beralih ke metode tradisional atau ingin hamil kembali (Drop Out). Meskipun turun, capaian 65% masih mendekati target 69,7% dengan realisasi 93,25%.

Penyebab paling umum adalah analisis data dan evaluasi program tahun sebelumnya. Perubahan Demografi Pasangan Usia Subur (PUS): terjadi perubahan dalam jumlah atau karakteristik PUS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2024 Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 54.602 (sumber: Pemuktahiran PK 23, Data Siga 2024), pada tahun 2025 Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 53.620 (sumber : pemuktahiran PK 23, Data Siga 2025), terjadi penurunan jumlah PUS sebesar 982, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah PUS yang mendekati masa menopause meningkat, serta banyak PUS yang Ingin Anak Lagi (IAL)/ Ingin Anak Segera (IAS), sehingga permintaan terhadap kontrasepsi modern menurun secara alami.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian target mCPR yang telah dilakukan antara lain Intensifikasi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada akseptor DO (Drop Out) dan penguatan rantai pasok alat kontrasepsi ke Fasyankes Pemerintah dan swasta, penambahan jumlah tenaga PLKB / PKB dilapangan. kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Permasalahan yang sering terjadi Tantangan pada Administrasi dan Pelaporan Digital: Meskipun kegiatan fisik di lapangan berjalan masif, aspek pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi (SIGA dan Elsimil) mengalami kendala teknis yang mempengaruhi capaian indikator administratif. Hal ini terlihat pada Persentase Pendampingan TPK yang dilaporkan hanya 43,23% dan penurunan mCPR menjadi 65%

akibat pemutakhiran data (*cleansing*). Penurunan angka statistik ini lebih mencerminkan tantangan transisi digitalisasi data daripada penurunan kinerja riil petugas di lapangan

C. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2026 antara lain :

1. Penguatan Infrastruktur Digital: Mengingat kendala utama tahun ini adalah pelaporan, disarankan adanya dukungan anggaran khusus untuk penyediaan gawai kerja atau peremajaan gawai kerja bagi kader lini lapangan (TPK/PPKBD), terutama bagi petugas di wilayah *blank spot* atau sinyal lemah.
2. Peningkatan Kompetensi Pelaporan: Perlu dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) yang lebih intensif dan berkala khusus mengenai penggunaan aplikasi SIGA dan Elsimil bagi operator di tingkat Balai Penyuluhan KB Kecamatan, agar data yang diinput *real-time* dan valid.
3. Sinergi Lintas Sektor: Untuk mempertahankan rendahnya angka ASFR, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama harus ditingkatkan, khususnya dalam pencegahan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur.
4. Strategi "Klinik Data" Berkala: Melaksanakan evaluasi data (rekonsiliasi) setiap bulan—bukan lagi per semester—antara Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan Admin Kabupaten untuk meminimalisir *gap* (kesenjangan) antara kegiatan riil dengan laporan yang masuk di sistem aplikasi.
5. Intensifikasi KIE pada Akseptor Non-MKJP: Untuk meningkatkan kembali capaian mCPR, bidang akan fokus pada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada akseptor suntik dan pil agar beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD/Implan/MOW), yang terbukti memiliki tingkat putus pakai (*drop out*) lebih rendah.
6. Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK): Mengubah pola kerja TPK dari sekadar "pelapor" menjadi "pendamping aktif". Fokus utama adalah memastikan setiap Calon Pengantin (Catin) dan Ibu Hamil benar-benar mendapatkan edukasi pencegahan stunting, serta memastikan pendampingan tersebut terinput 100% ke dalam Elsimil.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 20.959.015.585,- sumberdana dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan DAK . Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 19.244.500.809 dan Anggaran untuk Belanja Modal Rp. 1.400.445.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 adalah 91,81% ada efisiensi Rp. 1.714.485.203,- (8,18%) dengan rincian sebagai berikut :

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP SASARAN STRATEGIS

N O	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	836.571.200	775.287.276	61.283.924.	7,32%
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	357.034.800	309.003.362	48.031.438	13,45%
3.	Program perlindungan perempuan	5.226.935.600	5.132.687.830	94.248.770	1,80%
4.	Program peningkatan kualitas keluarga	147.244.000	122.873.400	24.370.600	16,55%
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	137.029.000	108.209.206	28.819.794	21,03%
6.	Program Pengendalian Penduduk	779.099.800	691.017.000	88.082.800	11,30%
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.891.708.000	4.426.591.944	465.116.056	9,50%
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.870.897.200	1.756.319.200	114.578.000.	6,12%
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.712.495.985,-	5.922.511.591,-	789.984.394,-	11,76%
JUMLAH		20.959.015.585,-	19.244.500.809,-	1.714.485.203,-	8,18%

Realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 19.244.500.809,-** atau **91.81%** dari pagu anggaran **Rp. 20.959.015.585,-** , ada efisiensi anggaran sebesar **8,18%**. Walaupun serapan anggaran 91,81 % Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dapat mencapai kinerja yang diharapkan dikarenakan dilakukan inovasi dan metode kerja yang yang disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Jika dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 telah direncanakan pada Renstra Dinas P3AP2KB Periode 2021 - 2026, yang kemudian dituangkan dalam Renja dan disampaikan ke TAPD melalui Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan anggaran program dan kegiatan yang prioritas adalah sesuai dengan KUA-PPAS yang ditetapkan oleh TAPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama lima tahun cukup baik, hanya saja ada beberapa kegiatan yang ada pada dokumen renstra tidak teranggarkan secara konsisten sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra), bahkan tidak teranggarkan karena anggaran daerah tidak memadai, kemudian anggaran pada program yang pendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, jika diperhatikan Adapun program yang dilaksanakan dan rasio realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, rasio realisasi anggaran tahun 2025 85%, sementara Tahun 2024 sebesar 97% , terdapat penurunan sebesar 12% terhadap realisasi capaian anggaran
2. Program Perlindungan Perempuan rasio realisasi capaian anggaran tahun 2025 sebesar 78% , terdapat penurunan rasio capaian realisasi anggaran dibanding tahun 2024 sebesar 98% (20%), hal ini dapat dijelaskan bahwa sumber dana anggaran untuk program perlindungan perempuan berasal dari dana DAK BOPPA, dalam pelaksanaan dilapangan terjadi ketidaksesuaian sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Program Peningkatan kualitas keluarga, rasio realisasi tahun 2024 sebesar 94% dan tahun 2025 sebesar 98%
4. Program Pemenuhan Hak anak, rasio realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 93% dan tahun 2025 sebesar 94%.
5. Program Perlindungan Khusus anak, rasio realisasi tahun 2024 sebesar 100% dan tahun 2025 sebesar 81%.
6. Program Pengendalian Penduduk, rasio realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 100% dan tahun 2025 sebesar 100%.
7. Program Keluarga Berencana, rasio realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 96 % dan tahun 2025 sebesar 90,49 %.

3.3.1 Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja dengan penyerapan anggaran per sasaran strategis. Apabila rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari penyerapan anggaran maka sasaran tersebut di anggap **efisien**, sebaliknya apabila penyerapan anggaran yang lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja maka dianggap **tidak efisien**.

**TABEL 3.35 REALISASI ANGGARAN DI BANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2025**

N O	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	REALISASI	TINGKAT
	SASARAN	ANGGARAN	KINERJA	EFISIEN
	STRATEGIS	%	%	
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Di Kabupaten tanjung Jabung Barat	92,67	93,13	Efisien
2.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	84,45	108,72	Efisien
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	98,20	115,67	Efisien
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	83,45	141	Efisien
5.	Terkendalnya Pertambahan Penduduk	88,69	101,70	Efisien
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi	90,49	241,12	Efisien
7.	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	93,88	96,12	Efisien
Rata - rata		90,26	128,21	

Table 3.35 memberikan gambaran realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025, apabila dibandingkan dengan capaian Sasaran Strategis menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien untuk mendukung capaian Indikator Sasaran Strategis.

3.3.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2026 untuk perbaikan kedepan, antara lain :

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan, melalui :
 - a. Melakukan reuiu RKA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/*Output* dalam RKA dengan kebutuhan OPD.
 - b. Melakukan reuiu DIPA secara berkala dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan

program/kegiatan terutama untuk anggaran sumber dana DAK/APBN segera dilakukan revisi sesuai petunjuk teknis dan target yang telah ditetapkan

- c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal perangkat daerah sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam KAK dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan .
- e. Penyusunan rencana aksi agar pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan sinkronisasi dengan ketersediaan anggaran dibagian keuangan
- f. Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal, melalui :'
- g. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut
- h. Memastikan seluruh kepala bidang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rapat internal.
- i. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja bidang

Mari Wujudkan Generasi Emas 2045

**Ekonomi
Lebih Stabil**

**Kesehatan Ibu
dan Anak Terjaga**

**Lingkungan Rumah
Lebih Harmonis**

**Waktu Asuh
Lebih Optimal**

**Pendidikan Anak
Lebih Terjamin**

**Masa Depan
Lebih Terencana**

4. Penutup

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori **(Baik)**. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar (110,25%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesenjangan Gender, didukung 2 indikator kinerja dengan capaian sebesar 97,20% atau kategori **Sangat Baik**;
- b. Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak, didukung 1 indikator sebesar 115, 67 % atau kategori **sangat Baik**;
- c. Meningkatnya Kualitas Keluarga, didukung 1 indikator sebesar 141% atau kategori **sangat Baik**;
- d. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penduduk, didukung 1 indikator sebesar 101,70% atau kategori **Sangat Baik**;
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, didukung 1 indikator sebesar 75,24 atau kategori **Baik**.
- f. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

4.1 PERMASALAHAN

Beberapa inovasi baik instrument pendukung kinerja maupun inovasi program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis yang ada terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum secara optimal. Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran;
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan berbasis gender online;
3. Masih rendahnya informasi manfaat ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menikah;
4. Kurang optimalnya kader UPPKA untuk aktif mendorong kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

4.2 REKOMENDASI

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pencegahan dan pelayanan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan advokasi KIE KB sebagai upaya mendorong kesertaan KB;
4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) dalam rangka mewujudkan tercapainya kualitas penduduk yang tinggi;
5. Meningkatkan kualitas Tribina (BKB, BKR, BKL) untuk mendorong pengurangan angka stunting;
6. Meningkatkan kapasitas kader UPPKS sebagai upaya mendorong ekonomi keluarga.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun kedepan.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



AINA DEWIANA

Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004

APRESIASI DAN PENGHARGAAN DP3AP2KB TANJAB BARAT TAHUN 2025



Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana untuk mendukung peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat.

“

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan ketahanan keluarga untuk pembangunan berkelanjutan



Pemberdayaan Perempuan



Perlindungan Anak



Pengendalian Penduduk



Keluarga Berencana



PENGHARGAAN PROGRAM GENTING



Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima apresiasi atas partisipasi aktif dalam Program “Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)” di Provinsi Jambi.

Program ini merupakan bentuk sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kepedulian sosial dan penguatan peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Penghargaan ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia.

HARGANAS ke-32 Tingkat Provinsi Jambi



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi



PIAGAM PENGHARGAAN

dengan bangga diberikan kepada:

TERBAIK II

PADA PENILAIAN GELAR PRODUK UPPKA DALAM RANGKA
HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) KE-32 TINGKAT PROVINSI JAMBI
DI KABUPATEN KERINCI TANGGAL 30-31 JULI 2025

KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI

DRS. PUTUT RIYATNO, M.KES

Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meraih Terbaik II dalam penilaian Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32 tingkat Provinsi Jambi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam mengembangkan produk UPPKA yang kreatif, produktif, dan memiliki daya saing dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok yang terus berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 318/MEN/TK.05/7/2025

Dengan ini memberikan penghargaan Kepada :

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025

Jakarta, 23 Juli 2025

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia



Arifatul Choiri Fauzi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Piagam penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, sinergi, dan keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan atas upaya berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025.